PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)

(Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di JII pada Tahun 2013-2015)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU EKONOMI ISLAM

Oleh:

YUNAS DEWANTA MUTIK
11390048

PEMBIMBING:

Drs. AKH. YUSUF KHOIRUDDIN, M.Si

KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap kaitannya dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), perusahaan diharapkan dapat membina hubungan baik dengan *Stakeholder*. Pemerintah melalui UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mewajibkan perusahaan untuk selalu menjaga hubungan baik dengan lingkungan. Meskipun perlu pengalokasian dana perusahaan untuk alokasi kegiatan CSR, karena tidak sedikit perusahaan yang semakin besar karena kegiatan CSR.

Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 33 perusahaan manufaktur yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* dengan sampel penelitian 19 perusahaan tang terdaftar berturut-turut dalam DES. Penelitian ini menggunkan metode *purposive sampling* yaitu metode penentuan jumlah sampling yang diambil secara acak berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Untuk tujuan analisis digunakan data sekunder berupa data *cross secion* yaitu 19 perusahaan yang terdaftar di DES dan data *time series* (2013-2015). Analisis yang digunakan yaitu analisis data panel, untuk melihat pengaruh variabel independen maupun dependen baik secara bersama-sama maupun secara individu.

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan menggunkan aplikasi EVIEWS 7 model *Random Effect* terpilih sebagai model terbaik dalam mengestimasi data panel yang ada. Hasil menunjukan bahwa variabel independen ukuran dewan komisaris, komposisi dewankomisaris independen , ukuran komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Sedangkan secara individu atau parsial, hanya satu variabel saja yaitu frekuensi rapat dewan komisaris yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan sedangkan variabel lain terbuki berpengaruh secara signifikan.
Kata kunci: *Good Corporate Governance (GCG), ukuran perusahaan , corporate social responsibility, Jakarta Islamic Index (JII)*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan konsep akuntansi yang dapat membawa perusahaan agar melaksanakan tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan masyarakat. CSR dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yang termuat pada pasal 1 ayat (3) dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diartikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

CSR timbul sebagai akibat dari keberadaan perusahaan yang aktivitasnya selain memberi banyak manfaat juga menimbulkan banyak dampak negatif. Dampak negatif tersebut terutama dirasakan oleh masyarakat sekitar yang berada dekat dengan perusahaan. Beberapa kasus seperti kasus PT Lapindo Brantas dan PT Freeport menunjukan bahwa masih banyak perusahaan di Indonesia yang kurang memperdulikan masalah lingkungan.

CSR dapat dijadikan satu dari sekian alternatif yang dapat dikembangkan untuk membagi arah tanggung jawab perusahaan terhadap berbagai persoalan mendasar mengenai isu sosial dan lingkungan, juga sebagai wahana untuk menjaga dan melakukan upaya-upaya guna menanggulangi dan menanggapi munculnya eksen negatif dunia industrial (Nor Hadi, 2011:6). Selain itu, dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas

diterbitkan dan mewajibkan perseroan yang bidang usahanya dibidang atau yang terkait dengan bidang sumberdaya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pada pasal 66 ayat (2) c menyebutkan bahwa laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus termuat dalam laporan tahunan.

Praktik pengungkapan CSR jika dilakukan secara berkesinambungan oleh perusahaan akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Namun pelaksanaan CSR belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh minimnya perhatian perusahaan terhadap pelaksanaan CSR. Selain itu, sebagai konsep yang masih relatif baru, CSR masih kontroversial dikalangan pebisnis dan akademisi. Kelompok yang menolak mengajukan argumen bahwa perusahaan adalah organisasi pencari laba, dan bukan person atau sekedar kumpulan orang seperti halnya dalam organisasi sosial. Sedangkan kelompok yang mendukung wacana CSR berpendapat bahwa perusahaan tidak dapat dipisahkan dari para individu yang terlibat di dalamnya, yakni pemilik dan karyawannya. Tetapi mereka tidak boleh hanya memikirkan keuntungan finansial perusahaannya saja, melainkan harus memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap publik, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan.

Banyaknya pembahasan mengenai CSR merupakan konsekuensi logis dari implementasi praktek *Good Corporate Governance* (GCG)yang prinsipnya antara lain menyatakan perlunya perusahaan memperhatikan kepentingan *stakeholder* sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerjasama yang aktif dengan *sakeholder* sesuai dengan aturan yang ada guna menjalin kerjasama

yang aktif demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. konsep GCG adalah konsep yang di dalamnya menyangkut struktur perseroan, yang terdiri dari unsur-unsur RUPS, direksi, dan komisaris, sehingga dapat terjalin hubungan dan mekanisme kerja, pembagian tugas kewenangan, dan tanggungjawab yang harmonis, baik secara *intern* maupun *ekstern* dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan *shareholder* dan *stakeholder*.

Good Corporate Governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholder*. Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG sejak menandatangani *letter of intent* (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat internasional (Trigunarsih, 2003 dalam www.madani-ri.com).

Menurut Monks dikutip dalam Waryanto mekanisme GCG akan bermanfaat dalam mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholders.* Untuk mendukung hal tersebut, pelaksanaan GCG harus didukung dengan organ perusahaan yang harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab semata-mata demi kepentingan suatu perusahaan. Organ perusahaan tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS), dewan direksi, dewan komisaris, serta organ perusahaan lain yang membantu terwujudnya *good governance*, sekertaris perusahaan komite audit, dan komite-komite lain yang membantu pelaksanaan GCG, (Waryanto, 2010:3-7).

Dewan komisaris merupakan puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan yang memiliki peran dalam sistem pengawasan. Di Indonesia dewan komisaris merupakan organ yang bersifat pasif dan tidak dapat menjalankan fungsi pengawasanya secara efektif terhadap direksi, atau sebaliknya peran komisaris yang terlalu kuat dalam perusahaan, sehingga seringkali melakukan intervensi terhadap kebijakan direksi. Sikap pasif ini pada akhirnya dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas serta para *stakeholder* lainya (Indra Surya & Ivan Yustivandana, 2008:134).

Peraturan di Bursa Efek Jakrta (BEJ) mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat di BEJ untuk memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota dewan komisaris yang dapat dipilih dahulu melalui RUPS sebelum pencaatan dan mulai efektif bertindak sebagai komisaris independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat. Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat, atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan (Indra Surya & Ivan Yustivandana, 2008:134). Komisaris independen ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan para pihak, yaitu pemegang saham utama, direksi, komisaris, manajemen, karyawan, maupun pemegang saham publik. Dalam

penelitian ini akan meneliti mengenai ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen dan frekuensi rapat dewan komisaris. Penelitian ini juga akan mengukur variabel komite audit. Hal ini didasarkan pada keputusan Bapepam-LK Nomor Kep-29/PM/2004 nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Variabel komite audit akan diukur dengan ukuran, independensi dan frekuensi rapat komite audit.

Ukuran perusahaan yang dilihat dari total nilai asetnya dapat menjadi gambaran apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba yang besar. Perusahaan dengan ukuran besar pada umumnya akan jauh lebih mampu untuk meningkatkan tingkat laba mereka karena memiliki sumber daya yang lebih besar daripada perusahaan yang kecil maka perusahaan yang besar seharusnya memiliki peran yang lebih besar dalam melakukan tanggung jawab sosial kepada masyarakat karena perusahaan yang besar juga akan menyebabkan dampak pada sekitarnya contohnya dalam lingkungan. pada umumnya perusahaan besar memiliki beragam produk dan beroperasi di berbagai wilayah, termasuk luar negri sehingga perusahaan besar lebih banyak melakukan pengungkapan sukarela dibandingkan perusahaan kecil (Prasojo, 2011).

Berbagai penelitian yang terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan keanekaragaman hasil. Sembiring (2005) dan Nofandrilla (2008) menemukan pengaruh yang signifikan ukuran perusahaan (*firm size*) terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraini

(2006) dan Roberts (1992) yang menyatakan bahwa *firm size* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan *Chief Executive Officer* (CEO) dan pengawasan yang dilakukan akan semakin efektif.

Di Indonesia sendiri, fenomena mengenai pengungkapan dan penerapan CSR masih terus berkembang. Pada tahun 2009, PT Trubaindo Coal Mining menghadapi ancaman penghentian aktivitas perusahaan oleh warga. Hal ini terjadi karena dalam laporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh PT Trubaindo, perusahaan menyatakan melakukan penggantian lahan warga Bentian Besar Kaltim sebesar Rp 40 Juta per hektar padahal warga hanya menerima Rp 10 Juta per hektar. Pada tanggal 26 Januari 2012 yang lalu, LSM Merah Putih dan Cagar Tuban melakukan unjuk rasa ke kantor PT Holcim di Jl. Basuki Rahmad Kabupaten Tuban untuk menolak rencana pembangunan pabrik yang dikhawatirkan dapat menambah daftar kerusakan yang terjadi di wilayah Tuban. Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah: **"PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM *JAKARTA ISLAMIC INDEX* "**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka didapati rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan?
2. Apakah komposisi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *corporate social responsibility* perusahaan?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan?
4. Apakah frekuensi rapat dewan komisari berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan masalah penelitian yang muncul maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

a. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Independen terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan.
b. Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan.
c. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan.

d. Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan.

e. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bidang Akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuwan dalam bidang etika bisnis baik sebagai wawasan keilmuwan maupun referensi akademik, khususnya dalam hal *Good Corporate Governance* dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

b. Bagi Peneliti, menambah wawasan keilmuwan bidang etika bisnis yaitu mengenai tatakelola perusahaan dan tanggung jawab sosial.

c. Bagi perusahaan, dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya pertanggung jawaban sosial perusahaan dan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijaksanaan perusahaan untuk lebih meningkatkan kepeduliannya pada lingkungan sosial. Memberikan informasi kepada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap C*orporate Social Responsibility*

d. Bagi investor, sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan investasi yang tepat mengenai gambaran pengaruh asimetri informasi dan mekanisme tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan.

D. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang menjadi gambaran awal dari apa yang dikatakan oleh peneliti. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang menjadi landasan untuk dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang dituangkan dalam pertanyaan, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian pembahasan yang menjelaskan sistematika penyajian hasil penelitian dari awal hingga penyajian kesimpulan dari hasi penelitian.

BAB II Landasan Teori

Bab ini mencakup kelanjutan dari bagian pendahuluan yang di dalamnya berisi tentang landasan teori dan pengembangan hipotesis. Bab ini membahas mengenai tinjauan teoritis tentang informasi-informasi mengenai variabel penelitian yang berisi tinjauan pustaka terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya pengembangan hipotesis dirumuskan dari landasan teori dan tinjauan pustaka pada penelitian terdahulu dan merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang akan diteliti.

BAB III Metodologi Penelitian

Merupakan metode penelitian yang berisi tentang jenis dan sifat penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh *Good Corporate Goverrnance* dan Ukuran Perusahaan terhadap *corporate social responsibility*. Populasi dalam penelitian ini

adalah semua perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index*. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah diterapkan. Data yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dipublikasikan oleh situs *www.idx.co.id* selama tahun 2013-2015.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Membahas tentang analisis data dan pembahasan. Bab ini akan menjelaskan tentang analisis regresi data panel menggunakan model *commont effect, fixed effect,* dan *random effect*. Kemudian akan dipilih model paling tepat menggunakan uji statistik F, uji *Langrange multiplier*, dan uji Haussman. Setelah terpilih model yang tepat, maka akan dilakukan uji t (pengujian signifikansi secara parsial), uji koefisien determinasi (R2), dan uji F (pengujian signifikansi secara simultan).

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran dan implikasi penelitian yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dunia investasi dan pasar modal di Indonesia.

BAB II

Landasan Teori

A. Telaah Pustaka

Untuk membedakan penelitian yang dilakukan ini dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka berikut adalah beberapa penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Penggunaan telaah pustaka ini ditujukan guna mengetahui penelitian-penelitian terdahulu yang berisikan hasil, metode maupun variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Hal ini dilakukan guna mempermudah penelitian yang akan dilakukan dan mengetahui posisi dari penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Setyarini dan Melvie Paramita (2011) yang berjudul Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia yang berkaitan dengan sumberdaya alam ditahun 2009 yang menguji pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan instutional dan jumlah dewan komisaris Independen. Hasil dari penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan instutional dan jumlah dewan komisaris independen ketiganya terbukti berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Yulia dan Melvie, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Waryanto (2010) yang berjudul pengaruh karakteristik perusahaan *good corporate governance* (GCG) terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) di Indonesia menguji

pengaruh karakterisik ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham instutional, kepemilikan saham asing, kepemilikan saham terkonsentrasi, ukuran perusahaan, dan rasio *leverage* yang merupakan proksi dari variabel *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa hanya karakteristik kepemilikan saham terkonsentrasi, ukurab perusahaan, dan rasio *Leverage* yang terbukti signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada alpha 5% Sementara variabel lain seperti ukuran Dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komie audit, jumlah rapat komite audit, kompetensi komite audit, kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham asing, dan kepemilikan saham instutional tidak terbukti adanya pengaruh terhadap pengungkapan CSR (Waryanto, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Andre Cristian yang berjudul Fakor-fakor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dalam laporan tahunan perusahaan yang terdiri dari ukuran komisaris, *leverage*, ukuran perusahaan tidak menunjukan adanya pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan informsi sosial perusahaan (Andre Crisian, 2009).

Penelitian yang dilakukan oleh Himatun Nawifah yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Perusahaan Manufakture yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah Tahun 2007-2009 menganalisis tentang faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, variabel yang digunakan yaitu *size*, ukuran dewan komisaris *laverage* dan profitabilitas. Hasil dari

penelitian ini menyebutkan bahwa *size* dengan proksi total *asset* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Ukuran dewan komisaris dengan proksi jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Variabel *laverage* dengan proksi DER (*Debt to equity ratio*) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Variabel profitabilitas tidak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Himatun Nuwifah, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Anggara Fahrizi yang berjudul Faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan *Corporate Socil Responsibility*(CSR) dalam laporan Tahunan Perusahaan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR dalam lapran tahunan perusahaan yang terdiri dari ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage,* ukuran dewan komisaris. Dari keempat variabel dalam penelitian ini menunjukan bahwa terdapat dua variabel yang terbukti memiliki pengaruh secara parsial terhadap pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan yang variabel ukuran perusahaan dan profitabilitas. Sedangkan variabel *leverage* dan variabel ukuran dewan komisaris secara parsial tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan (Anggara ,2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nukhin yang berjudul *Good Corporate Governance* dan Profitabilitas, Pengaruhnya terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menguji pengaruh kepemilikan instutional, komposisi dewan komisaris independen, yang

merupakan proksi variabel *Corporate Governance*, profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sementara Variabel lain yaitu komposisi dewan komisaris independen, profitabilitas, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol terbukti signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Ahmad Nukhin, 2010).

B. Kerangka Teori

1. Signaling Theory

Teori sinyal membantu pihak perusahaan (*agent*), pemilik (*prinsipal*), dan pihak luar perusahaan mengurangi asimetri informasi dengan menghasilkan kualitas atau integritas informasi laporan keuangan. Untuk memastikan pihak-pihak yang berkepentingan meyakini keandalan informasi keuangan yang disampaikan pihak perusahaan (*agent*), perlu mendapatkan opini dari pihak lain yang bebas memberikan pendapat tentang laporan keuangan (Jama'an, 2008).

2. Agency Theory

Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontrak antara manajer (*agent*) dan investor (*principal*). Teori keagenan dapat dipandang sebagai suatu versi dari *game theory*, yang membuat suatu model kontraktual antara dua atau lebih pihak, dimana salah satu pihak disebut *agent* dan pihak lain disebut *principal* (Zaenal Arifin, 2005:47). *Principal* mendelegasikan pertanggung jawaban atas *decision making* kepada *agent*, dpat dikatakan pula bahwa *principal* memberikan

suatu amanah kepada *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati (Jama'an, 2008).

Wewenang dan tanggung jawab *agent* maupun *principal* diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. Namun dalam prosesnya *agent* memiliki informasi yang lebih banyak (*full information*) dibandingkan dengan *principal* yang kemudian menimbulkan ketidak seimbangan informasi (*asimetry information*) (Weston dan Brigham, 1998:20).

Situasi ini akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi, yaitu suatu kondisi dimana ada ketidak seimbangan perolehan informasi antara manajemen sebagai penyedia informasi (*prepaper*) dengan pihak pemegang saham dan *stakeholder* pada umumnya sebagai pengguna informasi. Kelebihan informasi tersebut dapat memicu *agent* untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih menguntungkan pihaknya. Sedangkan pihak *principal* dapat mengalami kesulitan dalam mengontrol kebijakan perusahaan yang dikeluarkan oleh agent(R. Agus Sartono, 1994:24).

Keberadaan informasi asimetri jika dibiarkan terjadi, pada akhirnya dapat menyebabkan *adverse selection* maupun *moral hazard*, dengan konsekuensi perusahaan tidak melaksanakan kegiatan CSR. Jika tidak ada pelaporan dan pengungkapan yang objektif, maka *stakeholders* tidak akan dapat membedakan perusahaan yang melakukan CSR maupun tidak. Akibatnya, *stakeholders* tidak dapat memberikan penghargaan ataupun

sanksi-sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan CSR (Weston dan Brigham, 1998:17) .

Dengan tidak berjalannya mekanisme penghargaan maupun sanksi, maka perusahaan tidak akan termotivasi untuk melakukan CSR, fenomena ini disebut *adverse selection*. Para *stakeholders* tidak dapat pula mengobservasi tindakan perusahaan dalam melakukan CSR karena tidak melaksanakan observasi, maka perusahaan akan mengambil tindakan yang menguntungkan dirinya tetapi merugikan para *stakeholders*, peristiwa ini disebut dengan *moral hazard* (Zaenal Arifin, 2005:15).

Adverse selection maupun *moral hazard* adalah dua jenis asimetri informasi. *Adverse selection* adalah jenis asimetri informasi yang menyatakan bahwa satu pihak atau lebih yang melangsungkan suatu transaksi usaha, atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak lain. Sedangkan yang dimaksud *moral hazard* adalah jenis asimetri informasi yang menyatakan bahwa satu pihak atau lebih melangsungkan suatu transaksi usaha atau transaksi usaha potensial dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi, sedangkan pihak lainnya tidak. *Moral hazard* maupun *Adverse selection* umumnya terjadi pada perusahaan besar yang memisahkan kepemilikan dengan pengendalian (Zaenal Arifin, 2005:20).

3. Asymmetry Theory

Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar

perusahaan. Ada dua tipe asimetri informasi: *adverse selection* dan *moral hazard* (Dra. Rahmawati dkk,2006:8).

a. ***Adverse selection***

Adverse selection adalah jenis asimetri informasi dalam mana satu pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha, atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. *Adverse selection* terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan para pihak dalam (*insiders*) lainnya lebih mengetahui kondisi kini dan prospek ke depan suatu perusahaan daripada para investor luar.

b. ***Moral Hazard***

Moral hazard adalah jenis asimetri informasi dimana satu pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha atau transaksi usaha potensial dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi-transaksi mereka sedangkan pihak-pihak lainnya tidak. *Moral hazard* dapat terjadi karena adanya pemisahan pemilikan dengan pengendaliaan yang merupakan karakteristik kebanyakan perusahaan besar.

4. Legitimacy Theory

Konsep legitimasi berhubungan dengan bagaimana peran legitimasi dalam kehidupan sosial, khususnya pada terbentuk dan bertahannya wewenang. Dalam pengertian secara mendasar, legitimasi adalah tentang hubungan sosial tertentu yang dikukuhkan sebagai hal yang benar dan tepat secara moral. Legitmasi adalah status atau kondisi yang

terjadi ketika sistem nilai suatu entitas adalah sama dan sebangun dengan masyarakat (Ponny Harsanti, 2011:206).

Legitimasi adalah proses yang mengarah kesebuah organisasi yang dipandang sebagai sah. Organisasi berusaha untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam batas-batas dan norma-norma masyarakat masing-masing kegiatan yang dianggap sah. Batas dan norma-norma tidak statis dengan demikian mengharuskan organisasi harus *responsive* mengandalkan pada gagasan sebuah kontrak sosial. Ciri organisasi yang legitimet (dilegitimasi oleh masyarakat) adalah sesuai dengan kerangka rasional dan legal dalam masyarakat tersebut. Tujuan organisasi harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat bersangkutan (Ponny Harsanti, 2011:207).

5. *Stakeholder Theory*

Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Batasan *stakeholder* tersebut di atas mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan stakeholder, karena mereka adalah pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung mapun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan *stakeholder* bukan tidak mungkin akan menuai protes dan dapat mengeliminasi legitimasi *stakeholder* (Adam C. H, 2002 dalam Nor Hadi, 2011: 94-95).

C. *Corporate Social Responsibility*

Perkembangan CSR di Indonesia saat ini juga telah mengalami peningkatan. Peningkatan kegiatan CSR ini berupa peningkatan kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini terlihat dari semakin maraknya perusahaan yang melaporkan praktik CSR dalam laporan keuangan tahunan mereka. Pelaksanaan CSR di Indonesia merupakan suatu bentuk sukarela bagi perusahaan untuk mendorong perekonomian bangsa Indonesia (Edi Suharto, 209:10).

Pemerintah Indonesia juga memberikan respon yang baik terhadap pelaksanaan CSR dengan menganjurkan praktik CSR sebagaimana yang dimuat dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas Bab IV pasal 66 ayat 2b dan Bab V pasal 74. Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa laporan tahunan perusahaan harus mencerminkan praktik CSR (Edi Suharto, 209:31-32).

Tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa dikenal menjadi CSR merupakan suatu tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak dari aktivitasnya kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. CSR pada umumnya diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu pelaksanaan CSR juga diharapkan selalu memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di wilayah aktivitasnya.

a. Definisi *Corporate Social Reponsibility*

Schermerhorn memberi definisi tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal. CSR adalah pendekatan dimana perusahaan mengintregasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan(Edi Suharto, 209:102).

Menurut Edi Suharto, pendefinisian CSR yang relatif lebih mudah dipahami dan bisa dioperasionalkan untuk kegiatan audit adalah dengan mengembangkan konsep *triple bottom lines* dan menambahkannya dengan satu *line* tambahan yakni *procedure*. Dengan demikian CSR adalah kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangungan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan professional (Edi Suharto, 209:32).

Dalam aplikasi konsep 4P ini bisa dipadukan dengan komponen dalam ISO 26000. Konsep *planet* jelas berkaitan dengan aspek *the environment*. Konsep *people* didalamnya bisa merujuk pada konsep *social development* dan *humant right* yang tidak hanya menyangkut kesejahteraan ekonomi masyarakat melainkan pula kesejahteraan sosial. Sedangkan konsep *procedure* bisa menyangkut konsep *organizational governance, labor practice, fair operating practices* dan *consumer issues* (Edi Suharto, 209:103).

The World Business Council For Sustainable Development mendefinisikan tanggung jawab sosial merupakan satu bentuk tindakan yang berangkat dari perkembangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan beserta keluarganya dan sekaligus untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar perusahaan (Nor Hadi, 2011:47).

CSR juga dapat diartikan upaya pemenuhan kewajiban perusahaan untuk memperhatikan kondisi sosial dan lingkungan disamping memikirkan pencapaian profitabilitas dengan harapan ikut berperan dalam membangun perekonomian bangsa. Pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan ada tiga, yaitu : *stakeholder*, lingkungan alam serta kesejahteraan sosial umum (Muhammad & R. Lukman Farouni, 2009:173) .

Berdaasarkan beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai definisi *corporate social responsibility*. CSR dapat didefinisikan sebagai upaya perusahaan untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap para *stakeholder* yang berada di wilayahnya guna mencapai kesejahteraan sosial bersama dalam pelaksanaan kegiatan bisnis perusahaan agar terciptanya keselarasan antara perusahaan dengan para *stakeholder* maupun dengan lingkungannya.

b. Manfaat *Corporate Social Responsibility*

Pelaksanaan CSR bagi sebuah perusahaan bukan hanya sekedar untuk memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Manfaat diadakannya CSR bagi sebuah perusahaan selain untuk memberdayakan

masyarakat, CSR bermanfaat bagi operasional perusahaan agar dapat berjalan dengan lancar. Manfaat yang dapat diperoleh oleh sebuah perusahaan yang melaksanakan program CSR antara lain sebagai berikut (Hendrik Budi Untung, 2007:6)

1) Memperoleh lisensi untuk beroperasi secara sosial
2) Mereduksi risiko bisnis perusahaan
3) Melebarkan akses sumber daya bagi perusahaan
4) Membuka peluang pasar yang lebih luas
5) Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak limbah
6) Memperbaiki hubungan dengan *stakeholder*
7) Memperbaiki hubungan dengan regulator
8) Meningkatkan semangat dan produktifitas karyawan
9) Memperoleh peluang untuk mendapatkan penghargaan

c. Pengungkapan Tanggungjawab Sosial dalam Perspektif Islam

Allah telah menjanjikan kepada manusia untuk memberikan imbalan yang lebih dari apa yang telah manusia berikan ketika telah ditunaikannya tanggung jawab sosial ekonomi. Seperti pada surat berikut ini:

مثل الّذين ينفقون أموالهم في سبيل اللّه كَمثلِ حبّة أنبتت سبع سنابل في كلّ سنبلة مائة حبّة ۗ واللّه يضاعف لمن يشاء ۗ واللّه واسع عليم

Artinya: Perumpamaan orang -orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai:tumbuh seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.(Al-Baqarah: 261)

Allah juga telah melarang keras bagi manusia yang senang menimpun harta kekayaan. Hal ini akan dapat menimbulkan kesenjangan sosial diantara mereka. Hal ini tergambar pada ayat berikut ini:

ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى فللّه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل كَي لَا يكون دولة بين الْأغنياء منكم ۚ وما آتاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ۚ واتّقوا اللّه ۖ إنّ اللّه شديد العقَاب

Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.(Al-Hasyr: 7)

Timbulnya kerusakan baik di darat maupun di laut, adalah sebagai akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Padahal merekalah yang ditugaskan Tuhan untuk mengurus bumi ini, maka kegiaan tanggung jawab sosial oleh perusahaan selazimnya wajib dilakukan. Hal ini tercantum pada ayat berikut ini:

ظهر الفساد في البرّ والبحرِ بما كَسبت أيدي النّاس ليذيقهم بعض الّذي عملُوا لعلّهم يرجعون

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Ar-Rum Ayat 41)

D. Good Corporate Governance

1. Pengertian *Good Corporate Governance*

Komite *Cadbury* dalam Indra Surya mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensi dan pertanggungjawaban kepada steakholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya (Indra Surya,dkk, 2008:24).

Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (Muhammad Arief Effendi, 2009:1).

Keputusan Mentri BUMN No. 117/M-MBU/2002 menyatakan bahwa *corporate governance* adalah suatu proses dari sruktur yang digunakan oleh organ BUMN unuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap

memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan perauran perundang dan nilai etika (Indra Surya,dkk, 2008:24).

Corporate Governance didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemengang saham dalam jangka panjang (Muhammad Arief Effendi, 2009:1).

Menurut Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance* diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memeperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Adrian Sutedi, 2011:1).

Forum for Corporate Governance in Indonesia (*FCGI*) menjelaskan, sistem *corporate governance* memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh *return* atas investasinya dengan benar. *Corporate governance* juga membantu menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan *sustainable* di sektor korporasi. *Corporate governance* dapat didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan *stakeholder* internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. GCG juga diperlukan untuk mendorong

terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakatsebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha (David Tjondro dan R wilopo, 2011:2).

2. Asas *Good Corporate Governance*

FCGI menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing asas GCG yang dikemukakan oleh *FCGI* (David Tjondro dan R wilopo, 2011:2):

a. Transparansi *(Transparency)*

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus berinisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting bagi pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan.

b. Akuntabilitas *(Accountability)*

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

c. Responsibilitas *(Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen.*

d. Independensi *(Independency)*

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) mengungkapkan tujuan dari *Good Corporate Governance* (David Tjondro dan R wilopo, 2011:5)*:*

a. Meraih kembali kepercayaan investor dan kreditor nasional serta internasional
b. Memenuhi tuntutan standar global
c. Meminimalkan biaya kerugian dan biaya pencegahan atas penyalahgunaan wewenang pengelolaan

d. Meminimalkan *cost of capital* dengan menekan resiko yang dihadapi kreditur

e. Meiningkatkan nilai saham perusahaan

f. Mengangkat citra perusahaan di mata publik.

3. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (Zaenal Arifin, 2007:67)**:**

a. Adanya hak-hak pemegang saham yang harus diberi informasi yang benar dan tepat waktu, ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar, dan turut memperoleh bagian keuntungan

b. Adanya perlakuan sama terhadap para pemegang saham terutama kepada pemegang saham minoritas dan asing, dengan keterbukaan (*transparency*) informasi penting, melarang pembagian untuk pihak sendiri, dan melarang perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*)

c. Diakuinya peran pemegang saham, bersama pemegang kepentingan yang lain, dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat

d. Adanya pengungkapan (*disclosure*) yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemengang kepentingan.

e. Adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham merupakan pihak yang paling mendapakan perhatian dalam *corporate governance*.

4. *Good Corporate Governance* dalam Perspektif Islam

Allah dalam firmannya telah menetapkan manusia sebagai khalifah atau penguasa di bumi. Khalifah memiliki dua makna, yaitu menggantikan dan menguasai. Makna menggantikan dapat kita lihat pada ayat 30 Surah al-Baqarah ini. Manusia ditunjuk Allah Swt. sebagai pengganti Allah Swt. dalam mengolah bumi sekaligus memakmurkannya. Manusia diberi tugas dan tanggung jawab untuk menggali potensi-potensi yang terdapat di bumi ini, mengolahnya, dan menggunakannya dengan baik sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah SWT.

وإذ قال ربّك للملَائكَة إنّي جاعل في الْأرض خليفة ۖ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدّماء ونحن نسبّح بحمدك ونقَدّس لك ۖ قَال إنّي أعلم ما لَا تعلمون

Artinya :Dan (ingatlah) tatkala Tuhan engkau berkata kepada Malaikat : Sesungguhnya Aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah. Berkata mereka : Apakah Engkau hendak menjadikan padanya orang yang merusak di dalam nya dan menumpahkan darah, padahal kami bertasbih dengan memuji Engkau dan memuliakan Engkau ? Dia berkata : Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. *(Q.S. al-Baqarah [2]: 30)*

5. Dewan Komisaris

Berdasarkan UUPT, pada dasarnya tugas komisaris adalah: *pertama*, mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perusahaan. *Kedua*, memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam Anggaran Dasar PT dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada komisaris untuk memberikan

persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melaksanakan perbuatan hukum .

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Peranan dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan. Fungsi monitoring yang dilakukan oleh dewan komisaris dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran dewan komisaris (Hamonangan Siallagan dan Mas'ud Machfoedz, 2006:6).

6. Dewan Komisaris Independen

Di dalam suau perseroan, diwajibkan mempunyai sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen, berasal dari luar perusahaan serta tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya. Dalam perspekif hukum terdapat acuan yang menjadi landasan adanya komisaris independen, *pertama* acuan tentang kedudukan komisaris dalam suatu perseroan terbatas seperti yang diatus dalam pasal 108 sampai dengan pasal 121 Undang-Undang Perseroan Terbatas; *kedua*, ketentuan pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu tentang tanggung jawab atas informasi yang tidak benar dan meyesatkan, dimana komisaris termasuk pihak yang diancam oleh pasal tersebut, bila ikut menandatangani setiap dokumen yang berhubungan dengan penyampaian informasi kepada publik dalam rangka pernyataan pendaaftaran. Bagi seiap emiten yang akan mencatatkan sahamnya di bursa efek, maka PT Bursa efek mewajibkan adanya

komisaris independen di dalam kepengurusan emiten tersebut; *ketiga* adanya pedoman yang dikeluarkan Komite Nasional Good Corporate Governance sehubungan dengan kehadiran komisaris independen yang ada di perusahaan publik (Adrian Sutedi, 2011:83).

Dewan Komisaris (*boards of commissioner*) berfungsi untuk melakukan pengawasan, sedangkan komisaris independen (*independent commissioner)* berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Dewan Komisaris dipilih oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mewakili kepentingan para pemegang saham-saham tersebut (Muhammad Arief Effendi, 2009:9).

Dalam kaitannya dengan implementasi GCG di Perusahaan, diharapkan bahwa keberadaan komisaris maupun komisaris independen tidak hanya sebagai pelengkap, karena dalam diri komisaris melekat tanggung jawab secara hukum (yuridis). Oleh karena itu peranan dewan komisaris dan komisaris independen sangatlah penting dalam pelaksanaan mekanisme *good corporate governance* .

7. Komite Audit

Keberadaan Komite Audit diatur melalui surat edaran bapepam No. SE-03/PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Mentri BUMN No. KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Komite Audi terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh Komisaris Independen dengan dua orang ekternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan

keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komie Audit mempunyai fungsi membantu Dewan Komisaris untuk (Adrian Sutedi, 2011:161):

a. Meningkatkan kualitas laporan keuangan
b. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan
c. Meningkatkan efekivitas fungsi internal audit
d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Dalam bidang *financial reporting*, tanggung jawab Komite Audit secara umum adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan telah menggambarkan keadaan perusahaan secara wajar mengenai kondisi keuangan, hasil usaha, sera rencana dan komitmen jangka panjang. Secara spesifik, tanggung jawab tersebut meliputi perekomendasian akunan publik, menilai hal-hal yang menyangkut penugasan akuntan public, menialai kebijakan akuntansi serta pelaksanaannya, dan meneliti laporan keuangan, termasuk laporan tahunan, laporan auditor dan *management letters*.

Dengan melaksanakan fungsi dan tanggung jawab yang diembannya, diharapkan komite audit dapat berperan untuk mengurangi perilaku oportunistik (*earning management*) yang dilakukan oleh para manajer.

E. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan. Dalam teori yang dikemukakan oleh *wattz* dan *Zimmerman* menyatakan bahwa perusahaan besar cendrerung bertindak hati-hati dalam melakukan pengolahan perusahaan dan cenderung melakukan pengelolaan laba scara efisien. Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat (Marihot Nasution dan Doddy Setyawan, 2007:10). Ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan laba, total aktiva, tenaga kerja, dan lain-lain (Agnes Sawir, 2004:102).

F. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah variabel tanggung jawab sosial (CSR) dan dua variabel independen yaitu variabel *Good Corporate Governance* (GCG) yang diproksi dari ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, frekuensi rapat dewan komisaris, serta variabel ukuran perusahaan *(Size).* Adapun kerangka pemikiran yang ingin dikembangkan peneliti adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 KerangkaBerpikir

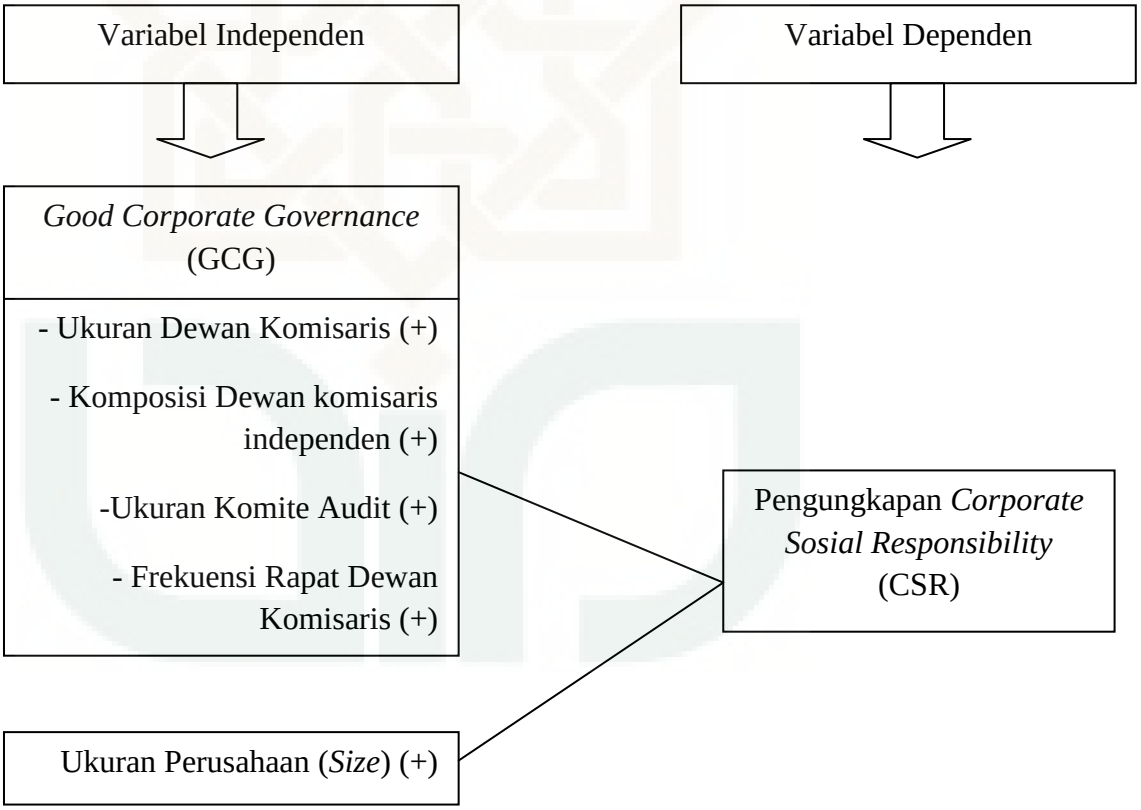

G. Hipotesis Penelitian

1. Hubungan Ukuran Dewan Komisaris dengan Pelaporan CSR

Dewan komisaris merupakan puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan yang memiliki peran dalam sistem pengawasan. Ukuran dewan komisaris akan menentukan kebijakan perusahaan termasuk dalam praktek pengungkapan CSR. Berdasarkan *Agency Theory* dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen. Melalui peran monitoring oleh Dewan Komisaris, perusahaan dapat berjalan sesuai peraturan yang berlaku dan dapat terjamin kelangsungannya(Waryanto, 2010:45). Dengan demikian jika dikaitkan dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan, dapat dikatan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris, maka komposisi pengalaman, keahlian, dan pengawasan yang dimiliki oleh dewan komisaris semakin meningkat, sehingga dapat melakukan aktivitas monitoring dengan lebih baik, maka diharapkan pengungkapan CSR akan semakin luas karenan kemungkinan manajer untuk menyembunyikan informasi menjadi lebih kecil. Dari penjelasan di atas, didapat hipotesis berikut:

H1: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Hubungan Komposisi Dewan Komisaris Independen dengan Pelaporan CSR

Komisaris independen adalah komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, yaitu pihak yang tidak memiliki hubungan bisnis dan kekeluargaan

dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Dalam panduan komisaris independen (NCCG) pada bab IX disebutkan bahwa untuk lebih memantapkan efektivitas komisaris independen, jumlah komisaris independen dalam satu perusahaan ditetapkan paling sedikit 30% dari jumlah seluruh komisaris atau paling sedikit satu orang (Antonius dan suharto, 2014:45). Dewan komisaris independen dianggap sebagai mekanisme pengendalian *intern* tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Jika dikaitkan dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan kebanyakan penelitian menunjukan adanya hubungan positif antara dewan komisaris independen dengan tingkat pengungkapan informasi oleh perusahaan (Ahmad nurkhin, 2010). Dengan demikian, tujuan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari stakeholders dengan mengungkapkan tanggung jawab sosial akan dapat diperoleh karena keberadaan dewan komisaris independen akan memberikan pengendalian dan pengawasan. Sehingga hipotesis penelitian berikutnya yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

H2 : Komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan.

3. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan CSR

Komite audit adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris. Anggota komite audit dapat berasal dari kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan guna mencapai tujuan komite audit (Indra surya dan Iva, 2008:145). Keberadaan

komite audit dapat dirasakan sebagai indikasi pengawasan dan berpengaruh signifikan dalam menyediakan informasi yang lebih kepada pemakai laporan keuangan. Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan laporan perusahaan, termasuk pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (Yunita ratnasari, 2011:75). Ho dan Wong dalam yuanita menyatakan bahwa keberadaan komie audit berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sehingga hipotesis penelitian berikutnya yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

H3: Ukuran Komite Audit Berpengaruh positif Signifikan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

4. Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Rapat dewan komisaris merupakan proses yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan perusahaan. Rapat dewan komisaris merupakan media komunikasi diantara anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas manajemen. Semakin baiknya mekanisme pengawasan perusahaan berpengaruh terhadao meningkatnya kualitas laporan keuangan perusahaan, termasuk pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Waryanto , 2010:46). Dari asumsi tersebut peneliti mngajukan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Frekuensi Rapat Dewan Komisaris berpengarug positif Signifikan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

5. Hubungan Ukuran Perusahaan dengan Pelaporan CSR

Teori legitimasi memiliki alasan tentang hubungan ukuran dan pengungkapan. Perusahaan yang lebih besar melakukan aktivitas yang lebih banyak sehingga memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat. Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. Hal ini karena perusahaan besar akan menghadapi resiko politis yang lebih besar dibanding perusahaan kecil. Secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial. Pengungkapan sosial yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis bagi perusahaan (Hasibuan, 2001). Dengan mengungkapkan kepedulian pada lingkungan melalui pelaporan keuangan, maka perusahaan dalam jangka waktu panjang bisa terhindar dari biaya yang sangat besar akibat dari tuntutan masyarakat.

Di samping itu, perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki public demand akan informasi yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang berukuran lebih kecil. Memiliki lebih banyak pemegang saham, berarti memerlukan lebih banyak juga pengungkapan, hal ini dikarenakan tuntutan dari para pemegang saham dan para analis pasar modal (Yuniarti Gunawan, 2000). Cowen et.al (1987) dalam Sembiring (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar mungkin akan memiliki pemegang saham yang memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan dalam laporan tahunan, yang merupakan media untuk menyebarkan informasi tentang tanggung jawab sosial keuangan perusahan. Dari penjelasan di atas, penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut:

H5: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB II

Landasan Teori

A. Telaah Pustaka

Untuk membedakan penelitian yang dilakukan ini dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka berikut adalah beberapa penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Penggunaan telaah pustaka ini ditujukan guna mengetahui penelitian-penelitian terdahulu yang berisikan hasil, metode maupun variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Hal ini dilakukan guna mempermudah penelitian yang akan dilakukan dan mengetahui posisi dari penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Setyarini dan Melvie Paramita (2011) yang berjudul Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia yang berkaitan dengan sumberdaya alam ditahun 2009 yang menguji pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan instutional dan jumlah dewan komisaris Independen. Hasil dari penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan instutional dan jumlah dewan komisaris independen ketiganya terbukti berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Yulia dan Melvie, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Waryanto (2010) yang berjudul pengaruh karakteristik perusahaan *good corporate governance* (GCG) terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) di Indonesia menguji

pengaruh karakterisik ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham instutional, kepemilikan saham asing, kepemilikan saham terkonsentrasi, ukuran perusahaan, dan rasio *leverage* yang merupakan proksi dari variabel *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa hanya karakteristik kepemilikan saham terkonsentrasi, ukurab perusahaan, dan rasio *Leverage* yang terbukti signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada alpha 5% Sementara variabel lain seperti ukuran Dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komie audit, jumlah rapat komite audit, kompetensi komite audit, kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham asing, dan kepemilikan saham instutional tidak terbukti adanya pengaruh terhadap pengungkapan CSR (Waryanto, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Andre Cristian yang berjudul Fakor-fakor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dalam laporan tahunan perusahaan yang terdiri dari ukuran komisaris, *leverage*, ukuran perusahaan tidak menunjukan adanya pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan informsi sosial perusahaan (Andre Crisian, 2009).

Penelitian yang dilakukan oleh Himatun Nawifah yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Perusahaan Manufakture yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah Tahun 2007-2009 menganalisis tentang faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, variabel yang digunakan yaitu *size*, ukuran dewan komisaris *laverage* dan profitabilitas. Hasil dari

penelitian ini menyebutkan bahwa *size* dengan proksi total *asset* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Ukuran dewan komisaris dengan proksi jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Variabel *laverage* dengan proksi DER (*Debt to equity ratio*) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Variabel profitabilitas tidak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Himatun Nuwifah, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Anggara Fahrizi yang berjudul Faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan *Corporate Socil Responsibility*(CSR) dalam laporan Tahunan Perusahaan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR dalam lapran tahunan perusahaan yang terdiri dari ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage,* ukuran dewan komisaris. Dari keempat variabel dalam penelitian ini menunjukan bahwa terdapat dua variabel yang terbukti memiliki pengaruh secara parsial terhadap pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan yang variabel ukuran perusahaan dan profitabilitas. Sedangkan variabel *leverage* dan variabel ukuran dewan komisaris secara parsial tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan (Anggara ,2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nukhin yang berjudul *Good Corporate Governance* dan Profitabilitas, Pengaruhnya terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menguji pengaruh kepemilikan instutional, komposisi dewan komisaris independen, yang

merupakan proksi variabel *Corporate Governance*, profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sementara Variabel lain yaitu komposisi dewan komisaris independen, profitabilitas, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol terbukti signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Ahmad Nukhin, 2010).

B. Kerangka Teori

1. Signaling Theory

Teori sinyal membantu pihak perusahaan (*agent*), pemilik (*prinsipal*), dan pihak luar perusahaan mengurangi asimetri informasi dengan menghasilkan kualitas atau integritas informasi laporan keuangan. Untuk memastikan pihak-pihak yang berkepentingan meyakini keandalan informasi keuangan yang disampaikan pihak perusahaan (*agent*), perlu mendapatkan opini dari pihak lain yang bebas memberikan pendapat tentang laporan keuangan (Jama'an, 2008).

2. Agency Theory

Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontrak antara manajer (*agent*) dan investor (*principal*). Teori keagenan dapat dipandang sebagai suatu versi dari *game theory*, yang membuat suatu model kontraktual antara dua atau lebih pihak, dimana salah satu pihak disebut *agent* dan pihak lain disebut *principal* (Zaenal Arifin, 2005:47). *Principal* mendelegasikan pertanggung jawaban atas *decision making* kepada *agent*, dpat dikatakan pula bahwa *principal* memberikan

suatu amanah kepada *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati (Jama'an, 2008).

Wewenang dan tanggung jawab *agent* maupun *principal* diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. Namun dalam prosesnya *agent* memiliki informasi yang lebih banyak (*full information*) dibandingkan dengan *principal* yang kemudian menimbulkan ketidak seimbangan informasi (*asimetry information*) (Weston dan Brigham, 1998:20).

Situasi ini akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi, yaitu suatu kondisi dimana ada ketidak seimbangan perolehan informasi antara manajemen sebagai penyedia informasi (*prepaper*) dengan pihak pemegang saham dan *stakeholder* pada umumnya sebagai pengguna informasi. Kelebihan informasi tersebut dapat memicu *agent* untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih menguntungkan pihaknya. Sedangkan pihak *principal* dapat mengalami kesulitan dalam mengontrol kebijakan perusahaan yang dikeluarkan oleh agent(R. Agus Sartono, 1994:24).

Keberadaan informasi asimetri jika dibiarkan terjadi, pada akhirnya dapat menyebabkan *adverse selection* maupun *moral hazard*, dengan konsekuensi perusahaan tidak melaksanakan kegiatan CSR. Jika tidak ada pelaporan dan pengungkapan yang objektif, maka *stakeholders* tidak akan dapat membedakan perusahaan yang melakukan CSR maupun tidak. Akibatnya, *stakeholders* tidak dapat memberikan penghargaan ataupun

sanksi-sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan CSR (Weston dan Brigham, 1998:17) .

Dengan tidak berjalannya mekanisme penghargaan maupun sanksi, maka perusahaan tidak akan termotivasi untuk melakukan CSR, fenomena ini disebut *adverse selection*. Para *stakeholders* tidak dapat pula mengobservasi tindakan perusahaan dalam melakukan CSR karena tidak melaksanakan observasi, maka perusahaan akan mengambil tindakan yang menguntungkan dirinya tetapi merugikan para *stakeholders*, peristiwa ini disebut dengan *moral hazard* (Zaenal Arifin, 2005:15).

Adverse selection maupun *moral hazard* adalah dua jenis asimetri informasi. *Adverse selection* adalah jenis asimetri informasi yang menyatakan bahwa satu pihak atau lebih yang melangsungkan suatu transaksi usaha, atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak lain. Sedangkan yang dimaksud *moral hazard* adalah jenis asimetri informasi yang menyatakan bahwa satu pihak atau lebih melangsungkan suatu transaksi usaha atau transaksi usaha potensial dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi, sedangkan pihak lainnya tidak. *Moral hazard* maupun *Adverse selection* umumnya terjadi pada perusahaan besar yang memisahkan kepemilikan dengan pengendalian (Zaenal Arifin, 2005:20).

3. Asymmetry Theory

Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar

perusahaan. Ada dua tipe asimetri informasi: *adverse selection* dan *moral hazard* (Dra. Rahmawati dkk,2006:8).

a. ***Adverse selection***

Adverse selection adalah jenis asimetri informasi dalam mana satu pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha, atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. *Adverse selection* terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan para pihak dalam (*insiders*) lainnya lebih mengetahui kondisi kini dan prospek ke depan suatu perusahaan daripada para investor luar.

b. ***Moral Hazard***

Moral hazard adalah jenis asimetri informasi dimana satu pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha atau transaksi usaha potensial dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi-transaksi mereka sedangkan pihak-pihak lainnya tidak. *Moral hazard* dapat terjadi karena adanya pemisahan pemilikan dengan pengendaliaan yang merupakan karakteristik kebanyakan perusahaan besar.

4. Legitimacy Theory

Konsep legitimasi berhubungan dengan bagaimana peran legitimasi dalam kehidupan sosial, khususnya pada terbentuk dan bertahannya wewenang. Dalam pengertian secara mendasar, legitimasi adalah tentang hubungan sosial tertentu yang dikukuhkan sebagai hal yang benar dan tepat secara moral. Legitmasi adalah status atau kondisi yang

terjadi ketika sistem nilai suatu entitas adalah sama dan sebangun dengan masyarakat (Ponny Harsanti, 2011:206).

Legitimasi adalah proses yang mengarah kesebuah organisasi yang dipandang sebagai sah. Organisasi berusaha untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam batas-batas dan norma-norma masyarakat masing-masing kegiatan yang dianggap sah. Batas dan norma-norma tidak statis dengan demikian mengharuskan organisasi harus *responsive* mengandalkan pada gagasan sebuah kontrak sosial. Ciri organisasi yang legitimet (dilegitimasi oleh masyarakat) adalah sesuai dengan kerangka rasional dan legal dalam masyarakat tersebut. Tujuan organisasi harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat bersangkutan (Ponny Harsanti, 2011:207).

5. *Stakeholder Theory*

Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Batasan *stakeholder* tersebut di atas mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan stakeholder, karena mereka adalah pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung mapun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan *stakeholder* bukan tidak mungkin akan menuai protes dan dapat mengeliminasi legitimasi *stakeholder* (Adam C. H, 2002 dalam Nor Hadi, 2011: 94-95).

C. *Corporate Social Responsibility*

Perkembangan CSR di Indonesia saat ini juga telah mengalami peningkatan. Peningkatan kegiatan CSR ini berupa peningkatan kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini terlihat dari semakin maraknya perusahaan yang melaporkan praktik CSR dalam laporan keuangan tahunan mereka. Pelaksanaan CSR di Indonesia merupakan suatu bentuk sukarela bagi perusahaan untuk mendorong perekonomian bangsa Indonesia (Edi Suharto, 209:10).

Pemerintah Indonesia juga memberikan respon yang baik terhadap pelaksanaan CSR dengan menganjurkan praktik CSR sebagaimana yang dimuat dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas Bab IV pasal 66 ayat 2b dan Bab V pasal 74. Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa laporan tahunan perusahaan harus mencerminkan praktik CSR (Edi Suharto, 209:31-32).

Tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa dikenal menjadi CSR merupakan suatu tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak dari aktivitasnya kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. CSR pada umumnya diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu pelaksanaan CSR juga diharapkan selalu memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di wilayah aktivitasnya.

a. Definisi *Corporate Social Reponsibility*

Schermerhorn memberi definisi tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal. CSR adalah pendekatan dimana perusahaan mengintregasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan(Edi Suharto, 209:102).

Menurut Edi Suharto, pendefinisian CSR yang relatif lebih mudah dipahami dan bisa dioperasionalkan untuk kegiatan audit adalah dengan mengembangkan konsep *triple bottom lines* dan menambahkannya dengan satu *line* tambahan yakni *procedure*. Dengan demikian CSR adalah kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangungan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan professional (Edi Suharto, 209:32).

Dalam aplikasi konsep 4P ini bisa dipadukan dengan komponen dalam ISO 26000. Konsep *planet* jelas berkaitan dengan aspek *the environment*. Konsep *people* didalamnya bisa merujuk pada konsep *social development* dan *humant right* yang tidak hanya menyangkut kesejahteraan ekonomi masyarakat melainkan pula kesejahteraan sosial. Sedangkan konsep *procedure* bisa menyangkut konsep *organizational governance, labor practice, fair operating practices* dan *consumer issues* (Edi Suharto, 209:103).

The World Business Council For Sustainable Development mendefinisikan tanggung jawab sosial merupakan satu bentuk tindakan yang berangkat dari perkembangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan beserta keluarganya dan sekaligus untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar perusahaan (Nor Hadi, 2011:47).

CSR juga dapat diartikan upaya pemenuhan kewajiban perusahaan untuk memperhatikan kondisi sosial dan lingkungan disamping memikirkan pencapaian profitabilitas dengan harapan ikut berperan dalam membangun perekonomian bangsa. Pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan ada tiga, yaitu : *stakeholder*, lingkungan alam serta kesejahteraan sosial umum (Muhammad & R. Lukman Farouni, 2009:173) .

Berdaasarkan beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai definisi *corporate social responsibility*. CSR dapat didefinisikan sebagai upaya perusahaan untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap para *stakeholder* yang berada di wilayahnya guna mencapai kesejahteraan sosial bersama dalam pelaksanaan kegiatan bisnis perusahaan agar terciptanya keselarasan antara perusahaan dengan para *stakeholder* maupun dengan lingkungannya.

b. Manfaat *Corporate Social Responsibility*

Pelaksanaan CSR bagi sebuah perusahaan bukan hanya sekedar untuk memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Manfaat diadakannya CSR bagi sebuah perusahaan selain untuk memberdayakan

masyarakat, CSR bermanfaat bagi operasional perusahaan agar dapat berjalan dengan lancar. Manfaat yang dapat diperoleh oleh sebuah perusahaan yang melaksanakan program CSR antara lain sebagai berikut (Hendrik Budi Untung, 2007:6)

1) Memperoleh lisensi untuk beroperasi secara sosial
2) Mereduksi risiko bisnis perusahaan
3) Melebarkan akses sumber daya bagi perusahaan
4) Membuka peluang pasar yang lebih luas
5) Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak limbah
6) Memperbaiki hubungan dengan *stakeholder*
7) Memperbaiki hubungan dengan regulator
8) Meningkatkan semangat dan produktifitas karyawan
9) Memperoleh peluang untuk mendapatkan penghargaan

c. Pengungkapan Tanggungjawab Sosial dalam Perspektif Islam

Allah telah menjanjikan kepada manusia untuk memberikan imbalan yang lebih dari apa yang telah manusia berikan ketika telah ditunaikannya tanggung jawab sosial ekonomi. Seperti pada surat berikut ini:

مثل الّذين ينفقون أموالهم في سبيل اللّه كَمثلِ حبّة أنبتت سبع سنابل في كلّ سنبلة مائة حبّة ۗ واللّه يضاعف لمن يشاء ۗ واللّه واسع عليم

Artinya: Perumpamaan orang -orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai:tumbuh seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.(Al-Baqarah: 261)

Allah juga telah melarang keras bagi manusia yang senang menimpun harta kekayaan. Hal ini akan dapat menimbulkan kesenjangan sosial diantara mereka. Hal ini tergambar pada ayat berikut ini:

ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى فللّه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل كَي لَا يكون دولة بين الْأغنياء منكم ۚ وما آتاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ۚ واتّقوا اللّه ۖ إنّ اللّه شديد العقَاب

Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.(Al-Hasyr: 7)

Timbulnya kerusakan baik di darat maupun di laut, adalah sebagai akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Padahal merekalah yang ditugaskan Tuhan untuk mengurus bumi ini, maka kegiaan tanggung jawab sosial oleh perusahaan selazimnya wajib dilakukan. Hal ini tercantum pada ayat berikut ini:

ظهر الفساد في البرّ والبحرِ بما كَسبت أيدي النّاس ليذيقهم بعض الّذي عملُوا لعلّهم يرجعون

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Ar-Rum Ayat 41)

D. Good Corporate Governance

1. Pengertian *Good Corporate Governance*

Komite *Cadbury* dalam Indra Surya mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensi dan pertanggungjawaban kepada steakholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya (Indra Surya,dkk, 2008:24).

Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (Muhammad Arief Effendi, 2009:1).

Keputusan Mentri BUMN No. 117/M-MBU/2002 menyatakan bahwa *corporate governance* adalah suatu proses dari sruktur yang digunakan oleh organ BUMN unuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap

memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan perauran perundang dan nilai etika (Indra Surya,dkk, 2008:24).

Corporate Governance didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemengang saham dalam jangka panjang (Muhammad Arief Effendi, 2009:1).

Menurut Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance* diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memeperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Adrian Sutedi, 2011:1).

Forum for Corporate Governance in Indonesia (*FCGI*) menjelaskan, sistem *corporate governance* memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh *return* atas investasinya dengan benar. *Corporate governance* juga membantu menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan *sustainable* di sektor korporasi. *Corporate governance* dapat didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan *stakeholder* internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. GCG juga diperlukan untuk mendorong

terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakatsebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha (David Tjondro dan R wilopo, 2011:2).

2. Asas *Good Corporate Governance*

FCGI menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing asas GCG yang dikemukakan oleh *FCGI* (David Tjondro dan R wilopo, 2011:2):

a. Transparansi *(Transparency)*

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus berinisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting bagi pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan.

b. Akuntabilitas *(Accountability)*

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

c. Responsibilitas *(Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen.*

d. Independensi *(Independency)*

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) mengungkapkan tujuan dari *Good Corporate Governance* (David Tjondro dan R wilopo, 2011:5)*:*

a. Meraih kembali kepercayaan investor dan kreditor nasional serta internasional
b. Memenuhi tuntutan standar global
c. Meminimalkan biaya kerugian dan biaya pencegahan atas penyalahgunaan wewenang pengelolaan

d. Meminimalkan *cost of capital* dengan menekan resiko yang dihadapi kreditur

e. Meiningkatkan nilai saham perusahaan

f. Mengangkat citra perusahaan di mata publik.

3. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (Zaenal Arifin, 2007:67)**:**

a. Adanya hak-hak pemegang saham yang harus diberi informasi yang benar dan tepat waktu, ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar, dan turut memperoleh bagian keuntungan

b. Adanya perlakuan sama terhadap para pemegang saham terutama kepada pemegang saham minoritas dan asing, dengan keterbukaan (*transparency*) informasi penting, melarang pembagian untuk pihak sendiri, dan melarang perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*)

c. Diakuinya peran pemegang saham, bersama pemegang kepentingan yang lain, dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat

d. Adanya pengungkapan (*disclosure*) yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemengang kepentingan.

e. Adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham merupakan pihak yang paling mendapakan perhatian dalam *corporate governance*.

4. *Good Corporate Governance* dalam Perspektif Islam

Allah dalam firmannya telah menetapkan manusia sebagai khalifah atau penguasa di bumi. Khalifah memiliki dua makna, yaitu menggantikan dan menguasai. Makna menggantikan dapat kita lihat pada ayat 30 Surah al-Baqarah ini. Manusia ditunjuk Allah Swt. sebagai pengganti Allah Swt. dalam mengolah bumi sekaligus memakmurkannya. Manusia diberi tugas dan tanggung jawab untuk menggali potensi-potensi yang terdapat di bumi ini, mengolahnya, dan menggunakannya dengan baik sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah SWT.

وإذ قال ربّك للملَائكَة إنّي جاعل في الْأرض خليفة ۖ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدّماء ونحن نسبّح بحمدك ونقَدّس لك ۖ قَال إنّي أعلم ما لَا تعلمون

Artinya :Dan (ingatlah) tatkala Tuhan engkau berkata kepada Malaikat : Sesungguhnya Aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah. Berkata mereka : Apakah Engkau hendak menjadikan padanya orang yang merusak di dalam nya dan menumpahkan darah, padahal kami bertasbih dengan memuji Engkau dan memuliakan Engkau ? Dia berkata : Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. *(Q.S. al-Baqarah [2]: 30)*

5. Dewan Komisaris

Berdasarkan UUPT, pada dasarnya tugas komisaris adalah: *pertama*, mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perusahaan. *Kedua*, memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam Anggaran Dasar PT dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada komisaris untuk memberikan

persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melaksanakan perbuatan hukum .

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Peranan dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan. Fungsi monitoring yang dilakukan oleh dewan komisaris dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran dewan komisaris (Hamonangan Siallagan dan Mas'ud Machfoedz, 2006:6).

6. Dewan Komisaris Independen

Di dalam suau perseroan, diwajibkan mempunyai sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen, berasal dari luar perusahaan serta tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya. Dalam perspekif hukum terdapat acuan yang menjadi landasan adanya komisaris independen, *pertama* acuan tentang kedudukan komisaris dalam suatu perseroan terbatas seperti yang diatus dalam pasal 108 sampai dengan pasal 121 Undang-Undang Perseroan Terbatas; *kedua*, ketentuan pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu tentang tanggung jawab atas informasi yang tidak benar dan meyesatkan, dimana komisaris termasuk pihak yang diancam oleh pasal tersebut, bila ikut menandatangani setiap dokumen yang berhubungan dengan penyampaian informasi kepada publik dalam rangka pernyataan pendaaftaran. Bagi seiap emiten yang akan mencatatkan sahamnya di bursa efek, maka PT Bursa efek mewajibkan adanya

komisaris independen di dalam kepengurusan emiten tersebut; *ketiga* adanya pedoman yang dikeluarkan Komite Nasional Good Corporate Governance sehubungan dengan kehadiran komisaris independen yang ada di perusahaan publik (Adrian Sutedi, 2011:83).

Dewan Komisaris (*boards of commissioner*) berfungsi untuk melakukan pengawasan, sedangkan komisaris independen (*independent commissioner)* berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Dewan Komisaris dipilih oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mewakili kepentingan para pemegang saham-saham tersebut (Muhammad Arief Effendi, 2009:9).

Dalam kaitannya dengan implementasi GCG di Perusahaan, diharapkan bahwa keberadaan komisaris maupun komisaris independen tidak hanya sebagai pelengkap, karena dalam diri komisaris melekat tanggung jawab secara hukum (yuridis). Oleh karena itu peranan dewan komisaris dan komisaris independen sangatlah penting dalam pelaksanaan mekanisme *good corporate governance* .

7. Komite Audit

Keberadaan Komite Audit diatur melalui surat edaran bapepam No. SE-03/PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Mentri BUMN No. KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Komite Audi terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh Komisaris Independen dengan dua orang ekternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan

keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komie Audit mempunyai fungsi membantu Dewan Komisaris untuk (Adrian Sutedi, 2011:161):

a. Meningkatkan kualitas laporan keuangan
b. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan
c. Meningkatkan efekivitas fungsi internal audit
d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Dalam bidang *financial reporting*, tanggung jawab Komite Audit secara umum adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan telah menggambarkan keadaan perusahaan secara wajar mengenai kondisi keuangan, hasil usaha, sera rencana dan komitmen jangka panjang. Secara spesifik, tanggung jawab tersebut meliputi perekomendasian akunan publik, menilai hal-hal yang menyangkut penugasan akuntan public, menialai kebijakan akuntansi serta pelaksanaannya, dan meneliti laporan keuangan, termasuk laporan tahunan, laporan auditor dan *management letters*.

Dengan melaksanakan fungsi dan tanggung jawab yang diembannya, diharapkan komite audit dapat berperan untuk mengurangi perilaku oportunistik (*earning management*) yang dilakukan oleh para manajer.

E. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan. Dalam teori yang dikemukakan oleh *wattz* dan *Zimmerman* menyatakan bahwa perusahaan besar cendrerung bertindak hati-hati dalam melakukan pengolahan perusahaan dan cenderung melakukan pengelolaan laba scara efisien. Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat (Marihot Nasution dan Doddy Setyawan, 2007:10). Ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan laba, total aktiva, tenaga kerja, dan lain-lain (Agnes Sawir, 2004:102).

F. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah variabel tanggung jawab sosial (CSR) dan dua variabel independen yaitu variabel *Good Corporate Governance* (GCG) yang diproksi dari ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, frekuensi rapat dewan komisaris, serta variabel ukuran perusahaan *(Size).* Adapun kerangka pemikiran yang ingin dikembangkan peneliti adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 KerangkaBerpikir

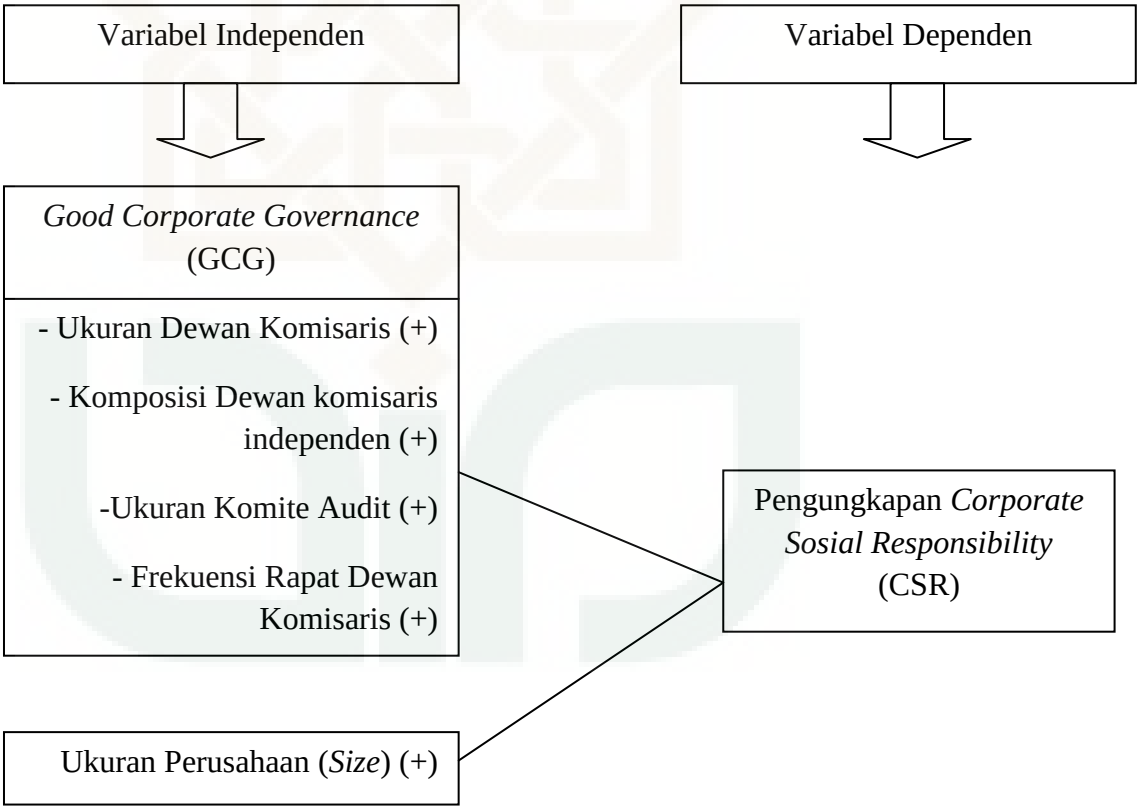

G. Hipotesis Penelitian

1. Hubungan Ukuran Dewan Komisaris dengan Pelaporan CSR

Dewan komisaris merupakan puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan yang memiliki peran dalam sistem pengawasan. Ukuran dewan komisaris akan menentukan kebijakan perusahaan termasuk dalam praktek pengungkapan CSR. Berdasarkan *Agency Theory* dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen. Melalui peran monitoring oleh Dewan Komisaris, perusahaan dapat berjalan sesuai peraturan yang berlaku dan dapat terjamin kelangsungannya(Waryanto, 2010:45). Dengan demikian jika dikaitkan dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan, dapat dikatan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris, maka komposisi pengalaman, keahlian, dan pengawasan yang dimiliki oleh dewan komisaris semakin meningkat, sehingga dapat melakukan aktivitas monitoring dengan lebih baik, maka diharapkan pengungkapan CSR akan semakin luas karenan kemungkinan manajer untuk menyembunyikan informasi menjadi lebih kecil. Dari penjelasan di atas, didapat hipotesis berikut:

H1: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Hubungan Komposisi Dewan Komisaris Independen dengan Pelaporan CSR

Komisaris independen adalah komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, yaitu pihak yang tidak memiliki hubungan bisnis dan kekeluargaan

dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Dalam panduan komisaris independen (NCCG) pada bab IX disebutkan bahwa untuk lebih memantapkan efektivitas komisaris independen, jumlah komisaris independen dalam satu perusahaan ditetapkan paling sedikit 30% dari jumlah seluruh komisaris atau paling sedikit satu orang (Antonius dan suharto, 2014:45). Dewan komisaris independen dianggap sebagai mekanisme pengendalian *intern* tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Jika dikaitkan dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan kebanyakan penelitian menunjukan adanya hubungan positif antara dewan komisaris independen dengan tingkat pengungkapan informasi oleh perusahaan (Ahmad nurkhin, 2010). Dengan demikian, tujuan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari stakeholders dengan mengungkapkan tanggung jawab sosial akan dapat diperoleh karena keberadaan dewan komisaris independen akan memberikan pengendalian dan pengawasan. Sehingga hipotesis penelitian berikutnya yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

H2 : Komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan.

3. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan CSR

Komite audit adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris. Anggota komite audit dapat berasal dari kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan guna mencapai tujuan komite audit (Indra surya dan Iva, 2008:145). Keberadaan

komite audit dapat dirasakan sebagai indikasi pengawasan dan berpengaruh signifikan dalam menyediakan informasi yang lebih kepada pemakai laporan keuangan. Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan laporan perusahaan, termasuk pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (Yunita ratnasari, 2011:75). Ho dan Wong dalam yuanita menyatakan bahwa keberadaan komie audit berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sehingga hipotesis penelitian berikutnya yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

H3: Ukuran Komite Audit Berpengaruh positif Signifikan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

4. Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Rapat dewan komisaris merupakan proses yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan perusahaan. Rapat dewan komisaris merupakan media komunikasi diantara anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas manajemen. Semakin baiknya mekanisme pengawasan perusahaan berpengaruh terhadao meningkatnya kualitas laporan keuangan perusahaan, termasuk pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Waryanto , 2010:46). Dari asumsi tersebut peneliti mngajukan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Frekuensi Rapat Dewan Komisaris berpengarug positif Signifikan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

5. Hubungan Ukuran Perusahaan dengan Pelaporan CSR

Teori legitimasi memiliki alasan tentang hubungan ukuran dan pengungkapan. Perusahaan yang lebih besar melakukan aktivitas yang lebih banyak sehingga memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat. Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. Hal ini karena perusahaan besar akan menghadapi resiko politis yang lebih besar dibanding perusahaan kecil. Secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial. Pengungkapan sosial yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis bagi perusahaan (Hasibuan, 2001). Dengan mengungkapkan kepedulian pada lingkungan melalui pelaporan keuangan, maka perusahaan dalam jangka waktu panjang bisa terhindar dari biaya yang sangat besar akibat dari tuntutan masyarakat.

Di samping itu, perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki public demand akan informasi yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang berukuran lebih kecil. Memiliki lebih banyak pemegang saham, berarti memerlukan lebih banyak juga pengungkapan, hal ini dikarenakan tuntutan dari para pemegang saham dan para analis pasar modal (Yuniarti Gunawan, 2000). Cowen et.al (1987) dalam Sembiring (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar mungkin akan memiliki pemegang saham yang memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan dalam laporan tahunan, yang merupakan media untuk menyebarkan informasi tentang tanggung jawab sosial keuangan perusahan. Dari penjelasan di atas, penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut:

H5: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tujuan Riset dan Jenis Pengujian Riset

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian terapan (*applied research*) yaitu penelitian yang menyangkut aplikasi teori untuk memecahkan permasalahan tertentu. Penelitian ini dimaksudkan agar hasil penelitiannya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang menginginkan informasi yang relevan untuk memutuskan berinvestasi dari informasi-informasi tentang nilai perusahaan. Penelitian terapan dilakukan untuk keperluan penerapan atau pengujian teori dan penilaian kegunaannya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Hasil penelitian terapan tidak perlu berupa penemuan baru, tetapi juga bisa sebagai aplikasi baru dari penelitian yang sudah ada (I Made Wirartha, 2001:152).

B. Dimensi Waktu Riset

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data gabungan antar perusahaan (*Cross Section*) dan data antar-waktu (*Time Series*) atau *Pooled Cross Sectional and Time Series Data* yang disebut juga data runtun waktu silang (*cross-sectional time series*), dimana banyak kasus (orang, perusahaan, Instansi, lembaga, dan lain-lain) diamati pada dua periode waktu atau lebih yang diindikasikan dengan penggunaan data *time series*. Data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data time series dengan jangka waktu 2014 sampai 2015.

C. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan yang terdaftar dalam *Jakara Islamic Index* pada tahun 2014-2015. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang termasuk kriteria penelitian. Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang memiliki karakteristik sama dengan populasinya, diambil sebagai sumber data penelitian (Sugiyono, 2008:46). Metode pemilihan atau pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan atau pengambilan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan dan kriteria tertentu.Tujuannya adalah untuk memperoleh sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan penelitian ini. Adapun kriteria pengambilan sampel dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Perusahaan yang berturut-turut terdaftar di *Jakara Islamic Index* selama tahun 2011-2014 secara terus-menerus atau tidak pernah di *delist.*
b) *Annual Report* / laporan keuangan harus disampaikan secara berturut, yaitu tahun 2014 – 2015 . Jika perusahaan tidak menyampaikan *Annual Report* / laporan keuangan secara berturut

– turut maka perusahaan tersebut tidak termasuk dalam objek penelitian.

c) Terdapat data *Annual Report* / laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai GCG dan CSR

D. Teknik Pengambilan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data kuantitatif. Data tersebut berupa data laporan keuangan dimulai dari tahun 2014-2015 yang diperoleh dari website IDX (*Indonesia Stock Exchange*) www.idx.co.id. Disamping itu, data dalam penelitian ini juga berasal dari sumber referensi lain yang relevan, seperti jurnal, website dan lain-lain.

E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Dependen

Variabel *dependen* atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2008:59). Variabel *dependen* yang digunakan dalam model penelitian ini adalah pengungkapan *corporate social responsibility* (Y). Untuk mengukur tingkat pengungkapan CSR tersebut, digunakan alat ukur skor penerapan CSR. Alat ukur ini menggunakan indikator-indikator variabel yang mengacu pada beberapa komponen pengungkapan *coporate social responsibility* sebagai berikut (Eddy Rismanda Sembiring, 2005:385) :

a. Indikator Lingkungan

b. Indikator Energi

c. Indikator Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja

d. Indikator Lain-lain Tentang Tenaga Kerja

e. Indikator Produk

f. Indikator Keterlibatan Masyarakat

g. Indikator Umum

Perhitungan pengungkapan CSR menggunakan cara variabel *dummy*, yaitu dengan cara :

Skor 0 : Apabila perusahaan tidak menggunakan item pada daftar pertanyaan

Skor 1 : Apabila perusahaan mengungkapkan item pada daftar pertanyaan

Pengukuran kemudian dilakukan berdasarkan indeks pengungkapan masing-masing perusahaan yang dihitung dengan membagi antara jumlah item pengungkapan sebenarnya yang diungkap oleh perusahaan dengan jumlah item yang diharapkan untuk diungkapkan. Perhitungan *Corporate Social Responsibility Index* (CSDI) menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{CSDI} = \frac{V}{M}$$

Keterangan :

CSDI : Indeks pengungkapan CSR

V : Jumlah item yang sesungguhnya diungkapkan oleh perusahaan

M :Jumlah item yang diharapkan mampu diungkapkan oleh perusahaan

1. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen (Sugiyono , 2008:33). Variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran Dewan Komisaris yang digunakan dalam penelitian ini diukur menggunakan jumlah seluruh Dewan Komisaris yang ada pada perusahaan.

2. Ukuran Dewan Komisaris Independen

Ukuran Dewan Komisaris Independen yang digunakan dalam penelitian ini diukur menggunakan Jumlah Dewan Komisaris Independen yang ada pada perusahaan.

3. Komite Audit

Komite Audit yang digunakan dalam penelitian ini diukur menggunakan jumlah komite audit independen yang ada pada perusahaan.

4. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Jumlah Rapat Dewan Komisaris merupakan jumlah pertemuan atau rapat internal yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam waktu satu tahun. Skala pengukuran untuk variabel ini adalah skala nominal yaitu dengan menggunakan indikator jumlah rapat Dewan Komisaris yang diukur dengan cara melihat jumlah rapat yang dilakukan Dewan Komisaris pada laporan tahunan perusahaan yang tercantum pada laporan tata kelola perusahaan.

5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat dihitung dengan menghitung nilai logaritma natural (Ln) dari nilai total aset yang dimiliki perusahaan pada tahun terseebut. Rumus untuk menghitung ukuran perusahaan adalah sebagai berikut :

$$Size = \log Total\ nilai\ aset\ perusahaan$$

F. Teknik Analisis Data

Data panel adalah kombinasi dari data *time series* dan *cross section*. Dengan mengakomodasi informasi yang terkait dengan variabel-variabel *cross-section* maupun *time series*, data panel secara substansial mampu mengatasi masalah yang ditimbulkan akibat mengabaikan variabel yang relevan (*Ommited-Variables*). Untuk mengatasi interkorelasi di antara variabel-variabel bebas yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak tepatnya penaksiran regresi maka digunakan metode regresi data panel (Haris Susilo Efendi, :449).

Ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel, yaitu dengan pendekatan *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*

1) Common Effect

Pendekatan ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel, yaitu hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu. Jadi diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Model persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + e_t$$

Dimana:

Y_{it} : pengungkapan CSR perusahaan ke-i tahun ke-t

$\beta_1 X_{1it}$: Ukuran Dewan Komisaris perusahaan ke-i tahun ke-t

$\beta_2 X_{2it}$: Ukuran Dewan Komisaris Independen perusahaan ke-i tahun ke-t

$\beta_3 X_{3it}$: Ukuran Komite Audit ke-i tahun ke-t

$\beta_4 X_{4it}$: Frekuensi Rapat Dewan Komisaris ke-i tahun ke-t

$\beta_5 X_{5it}$: Ukuran perusahaan ke-i tahun ke-t

e_t : nilai residu tahun ke-t

2) *Fixed Effect*

Metode ini mengasumsikan bahwa individu atau perusahaan memiliki intersep yang berbeda, tetapi memiliki *slope* regresi yang sama. Suatu individu atau perusahaan memiliki intersep yang sama besar untuk setiap perbedaan waktu demikian juga dengan koefisienya yang tetap dari waktu ke waktu (*time variant*) (Sofyan Yamin, 2011:200).

Untuk mengestimasi pendekatan *fixed effect* ini, akan digunakan teknik variabel *dummy* dalam menjelaskan perbedaan intersep tersebut. Model persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + e_t$$

Dimana:

Y_{it} : pengungkapan CSR perusahaan ke-i tahun ke-t

$\beta_1 X_{1it}$: Ukuran Dewan Komisaris perusahaan ke-i tahun ke-t

$\beta_2 X_{2it}$: Ukuran Dewan Komisaris Independen perusahaan ke-i tahun ke-t

$\beta_3 X_{3it}$: Ukuran Komite Audit ke-i tahun ke-t

$\beta_4 X_{4it}$: Frekuensi Rapat Dewan Komisaris ke-i tahun ke-t

$\beta_5 X_{5it}$: Ukuran perusahaan ke-i tahun ke-t

e_t : nilai residu tahun ke-t

3) *Random Effect*

Metode ini tidak menggunakan variabel *dummy* seperti halnya metode *fixed effect*, tetapi menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan

antarwaktu dan antarindividu antar perusahaan. Model *random effect* mengasumsikan bahwa setiap variabel mempunyai perbedaan intersep, tetapi intersep tersebut bersifat *random* atau stokastik.

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + e_t$$

Dimana:

Y_{it} : pengungkapan CSR perusahaan ke-i tahun ke-t

$\beta_1 X_{1it}$: Ukuran Dewan Komisaris perusahaan ke-i tahun ke-t

$\beta_2 X_{2it}$: Ukuran Dewan Komisaris Independen perusahaan ke-i tahun ke-t

$\beta_3 X_{3it}$: Ukuran Komite Audit ke-i tahun ke-t

$\beta_4 X_{4it}$: Frekuensi Rapat Dewan Komisaris ke-i tahun ke-t

$\beta_5 X_{5it}$: Ukuran perusahaan ke-i tahun ke-t

e_t : nilai residu tahun ke-t

Dalam pendekatan ini β_{0i} tidak lagi tetap (nonstokastik) tetapi bersifat random. Karena adanya korelasi antara variabel gangguan pada persamaan *random effect* ini, maka metode OLS tidak bisa digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien. Metode yang tepat digunakan untuk mengestimasi model *random effect* adalah GLS.

4) Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel

Pemilihan model untuk estimasi regresi data panel dapat dilakukan secara formal dan informal. Secara infromal pemilihan dapat dilakukan

berdasarkan pertimbangan tertentu. Seperti yang dilakukan oleh Judge mengenai perbedaan mendasar untuk menentukan pilihan antara pendekatan *fixed effect* dan *random effect*, yaitu (Sofyan Yamin: 255):

a. Jika T (jumlah data *time series*) besar dan N (jumlah data *cross section*) kecil, akan terdapat sedikit perbedaan nilai estimasi parameter antara *fixed effect* dengan *random effect*. Pada kasus ini *fixed effect* mungkin lebih disukai.
b. Ketika N lebih besar dari pada T, *random effect* lebih cocok digunakan bila unit *cross section* sampel adalah random/acak. Sedangkan bila kita sangat yakin dan percaya bahwa individu/*cross section* sampel tidak acak, maka *fixed effect* lebih cocok digunakan.
c. Jika komponen eror individu μi dan satu atau lebih variabel bebas berkorelasi, estimasi *random effect* akan bias, sedangkan yang diperoleh *fixed effect* tidak bias.
d. Jika N besar dan T kecil, serta jika asumsi untuk *random effect* terpenuhi, maka *random effect* lebih efisien dari pada *fixed effect*.

Sedangkan pemilihan estimasi secara formal, ada tiga prosedur pengujian yang dapat digunakan, yaitu uji statistik F , uji *Langrange Multiplier*, dan uji Hausman.

5) Uji Statistik F

Uji ini digunakan untuk memilih antara pendekatan *common effect* dan *fixed effect*. Kita akan mengetahui apakah teknik regresi data panel

dengan *fixed effect* lebih baik dari pada regresi data panel dengan *common effect*. Hipotesis nolnya adalah model *common effect* lebih baik dari pada *fixed effect*, dengan ketentuan apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka Ho ditolak. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka Ho diterima. Adapun rumus uji statistik F nya adalah sebagai berikut:

$$F = \frac{(SSR_R - SSR_U)/q}{(SSR_U)/(n-k)}$$

Dimana:

SSR_R : *sum of squared residuals* model *common effect*

SSR_U : *sum of squared residuals* model *fixed effect*

q : jumlah restriksi model *common effect*

n : jumlah observasi

k : jumlah parameter model *fixed effect*

6) Uji *Langrange Multiplier*

Uji ini digunakan untuk memilih antara model *common effect* dan *random effect*. Uji *langrange multiplier* ini bisa dilakukan menggunakan aplikasi STATA. Hipotesis nolnya adalah model *common effect* lebih baik dari pada *random effect*, dengan ketentuan apabila nilai statistik LM > nilai kritis statistik *chi-squares* maka Ho ditolak. Jika nilai statistik LM < nilai kritis statistik *chi-squares* maka Ho diterima.

7) Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara model *fixed effect* dan *random effect*. Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik *chi-squares* dengan *degree of freedom* sebanya *k* dimana *k* adalah jumlah variabel independen. Hipotesis nolnya adalah model *random effect* lebih baik dari pada *fixed effect*, dengan ketentuan apabila nilai statistik Hausman > nilai kritisnya maka Ho ditolak. Jika nilai statistik Hausman < nilai kritisnya maka Ho diterima. Untuk menentukan nilai statistik Hausman, akan digunakan aplikasi Eviews 6.0.

8) Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apakah kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas atau variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Mudrajad Kuncoro, 2004:84).

9) Uji F (pengujian secara simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis nolnya adalah rasio gini, pertumbuhan penduduk, investasi dalam negeri, investasi luar negeri, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketentuannya adalah sebagai berikut :

Jika probabilitas > dari 0,05 maka Ho diterima

Jika probabilitas < dari 0,05 maka Ho ditolak

Atau

JikaF_{hitung}<F_{tabel}maka Ho diterima

Jika F_{hitung}> F_{tabel} maka Ho ditolak

10) Uji t (pengujian secara parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependennya. Rumusan hipotesisnya adalah:

Ho : kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan

Ha : kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

Ho : kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan

Ha : kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan

Ho : *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan

Ha : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika probabilitas > dari 0,05 maka Ho diterima

Jika probabilitas < dari 0,05 maka Ho ditolak

Atau

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka Ho diterima

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka Ho ditolak

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tujuan Riset dan Jenis Pengujian Riset

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian terapan (*applied research*) yaitu penelitian yang menyangkut aplikasi teori untuk memecahkan permasalahan tertentu. Penelitian ini dimaksudkan agar hasil penelitiannya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang menginginkan informasi yang relevan untuk memutuskan berinvestasi dari informasi-informasi tentang nilai perusahaan. Penelitian terapan dilakukan untuk keperluan penerapan atau pengujian teori dan penilaian kegunaannya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Hasil penelitian terapan tidak perlu berupa penemuan baru, tetapi juga bisa sebagai aplikasi baru dari penelitian yang sudah ada (I Made Wirartha, 2001:152).

B. Dimensi Waktu Riset

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data gabungan antar perusahaan (*Cross Section*) dan data antar-waktu (*Time Series*) atau *Pooled Cross Sectional and Time Series Data* yang disebut juga data runtun waktu silang (*cross-sectional time series*), dimana banyak kasus (orang, perusahaan, Instansi, lembaga, dan lain-lain) diamati pada dua periode waktu atau lebih yang diindikasikan dengan penggunaan data *time series*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data time series dengan jangka waktu 2013 sampai 2015.

C. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan yang terdaftar dalam *Jakara Islamic Index* pada tahun 2013-2015. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang termasuk kriteria penelitian. Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang memiliki karakteristik sama dengan populasinya, diambil sebagai sumber data penelitian (Sugiyono, 2008:46). Metode pemilihan atau pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan atau pengambilan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan dan kriteria tertentu.Tujuannya adalah untuk memperoleh sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan penelitian ini. Adapun kriteria pengambilan sampel dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Perusahaan yang berturut-turut terdaftar di *Jakara Islamic Index* selama tahun 2013-2015 secara terus-menerus atau tidak pernah di *delist.*
b) *Annual Report*/laporan keuangan harus disampaikan secara berturut, yaitu tahun 2013 – 2015 . Jika perusahaan tidak menyampaikan *Annual Report*/laporan keuangan secara berturut – turut maka perusahaan tersebut tidak termasuk dalam objek penelitian.
c) Terdapat data *Annual Report*/laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai GCG dan CSR

D. Teknik Pengambilan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data kuantitatif, data tersebut berupa data laporan keuangan dimulai dari tahun 2013-2015 yang diperoleh dari website IDX (*Indonesia Stock Exchange*) www.idx.co.id. Disamping itu, data dalam penelitian ini juga berasal dari sumber referensi lain yang relevan, seperti jurnal, website dan lain-lain.

E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Dependen

Variabel *dependen* atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2008:59). Variabel *dependen* yang digunakan dalam model penelitian ini adalah pengungkapan *corporate social responsibility* (Y). Untuk mengukur tingkat pengungkapan CSR tersebut, digunakan alat ukur skor penerapan CSR. Alat ukur ini menggunakan indikator-indikator variabel yang mengacu pada beberapa komponen pengungkapan *coporate social responsibility* sebagai berikut (Eddy Rismanda Sembiring, 2005:385) :

a. Indikator Lingkungan
b. Indikator Energi
c. Indikator Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja
d. Indikator Lain-lain Tentang Tenaga Kerja
e. Indikator Produk
f. Indikator Keterlibatan Masyarakat
g. Indikator Umum

Perhitungan pengungkapan CSR menggunakan cara variabel *dummy*, yaitu dengan cara :

Skor 0 : Apabila perusahaan tidak menggunakan item pada daftar pertanyaan

Skor 1 : Apabila perusahaan mengungkapkan item pada daftar pertanyaan

Pengukuran kemudian dilakukan berdasarkan indeks pengungkapan masing-masing perusahaan yang dihitung dengan membagi antara jumlah item pengungkapan sebenarnya yang diungkap oleh perusahaan dengan jumlah item yang diharapkan untuk diungkapkan. Perhitungan *Corporate Social Responsibility Index* (CSDI) menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{CSDI} = \frac{V}{M}$$

Keterangan :

CSDI : Indeks pengungkapan CSR

V : Jumlah item yang sesungguhnya diungkapkan oleh perusahaan

M :Jumlah item yang diharapkan mampu diungkapkan oleh perusahaan

1. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen (Sugiyono , 2008:33). Variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Ukuran Dewan Komisaris

   Ukuran Dewan Komisaris yang digunakan dalam penelitian ini diukur menggunakan jumlah seluruh Dewan Komisaris yang ada pada perusahaan.

2. Ukuran Dewan Komisaris Independen

   Ukuran Dewan Komisaris Independen yang digunakan dalam penelitian ini diukur menggunakan Jumlah Dewan Komisaris Independen yang ada pada perusahaan.

3. Komite Audit

   Komite Audit yang digunakan dalam penelitian ini diukur menggunakan jumlah komite audit independen yang ada pada perusahaan.

4. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

   Jumlah Rapat Dewan Komisaris merupakan jumlah pertemuan atau rapat internal yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam waktu satu tahun. Skala pengukuran untuk variabel ini adalah skala nominal yaitu dengan menggunakan indikator jumlah rapat Dewan Komisaris yang diukur dengan cara melihat jumlah rapat yang dilakukan Dewan Komisaris pada laporan tahunan perusahaan yang tercantum pada laporan tata kelola perusahaan.

5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat dihitung dengan menghitung nilai logaritma natural (Ln) dari nilai total aset yang dimiliki perusahaan pada tahun terseebut. Rumus untuk menghitung ukuran perusahaan adalah sebagai berikut :

$$Size = \log Total\ nilai\ asset\ perusahaan$$

F. Teknik Analisis Data

Data panel adalah kombinasi dari data *time series* dan *cross section*. Dengan mengakomodasi informasi yang terkait dengan variabel-variabel *cross-section* maupun *time series,* data panel secara substansial mampu mengatasi masalah yang ditimbulkan akibat mengabaikan variabel yang relevan (*Ommited-Variables*). Untuk mengatasi interkorelasi di antara variabel-variabel bebas yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak tepatnya penaksiran regresi maka digunakan metode regresi data panel (Haris Susilo Efendi, :449).

Ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel, yaitu dengan pendekatan *Common Effect*, *Fixed Effect,* dan *Random Effect*

1) Common Effect

Pendekatan ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel, yaitu hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu. Jadi diasumsikan

bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Model persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + e_t$$

Dimana:

Y_{it} : pengungkapan CSR perusahaan ke-i tahun ke-t

$\beta_1 X_{1it}$: Ukuran Dewan Komisaris perusahaan ke-i tahun ke-t

$\beta_2 X_{2it}$: Ukuran Dewan Komisaris Independen perusahaan ke-i tahun ke-t

$\beta_3 X_{3it}$: Ukuran Komite Audit ke-i tahun ke-t

$\beta_4 X_{4it}$: Frekuensi Rapat Dewan Komisaris ke-i tahun ke-t

$\beta_5 X_{5it}$: Ukuran perusahaan ke-i tahun ke-t

e_t : nilai residu tahun ke-t

2) *Fixed Effect*

Metode ini mengasumsikan bahwa individu atau perusahaan memiliki intersep yang berbeda, tetapi memiliki *slope* regresi yang sama. Suatu individu atau perusahaan memiliki intersep yang sama besar untuk setiap perbedaan waktu demikian juga dengan koefisienya yang tetap dari waktu ke waktu (*time variant*) (Sofyan Yamin, 2011:200).

Untuk mengestimasi pendekatan *fixed effect* ini, akan digunakan teknik variabel *dummy* dalam menjelaskan perbedaan intersep tersebut. Model persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + e_t$$

Dimana:

Y_{it} : pengungkapan CSR perusahaan ke-i tahun ke-t

$\beta_1 X_{1it}$: Ukuran Dewan Komisaris perusahaan ke-i tahun ke-t

$\beta_2 X_{2it}$: Ukuran Dewan Komisaris Independen perusahaan ke-i tahun ke-t

$\beta_3 X_{3it}$: Ukuran Komite Audit ke-i tahun ke-t

$\beta_4 X_{4it}$: Frekuensi Rapat Dewan Komisaris ke-i tahun ke-t

$\beta_5 X_{5it}$: Ukuran perusahaan ke-i tahun ke-t

e_t : nilai residu tahun ke-t

3) Random Effect

Metode ini tidak menggunakan variabel *dummy* seperti halnya metode *fixed effect,* tetapi menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antarwaktu dan antarindividu antar perusahaan. Model *random effect* mengasumsikan bahwa setiap variabel mempunyai perbedaan intersep, tetapi intersep tersebut bersifat *random* atau stokastik.

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + e_t$$

Dimana:

Y_{it} : pengungkapan CSR perusahaan ke-i tahun ke-t

$\beta_1 X_{1it}$: Ukuran Dewan Komisaris perusahaan ke-i tahun ke-t

$\beta_2 X_{2it}$: Ukuran Dewan Komisaris Independen perusahaan ke-i tahun ke-t

$\beta_3 X_{3it}$: Ukuran Komite Audit ke-i tahun ke-t

$\beta_4 X_{4it}$: Frekuensi Rapat Dewan Komisaris ke-i tahun ke-t

$\beta_5 X_{5it}$: Ukuran perusahaan ke-i tahun ke-t

e_t : nilai residu tahun ke-t

Dalam pendekatan ini β_{0i} tidak lagi tetap (nonstokastik) tetapi bersifat random. Karena adanya korelasi antara variabel gangguan pada persamaan *random effect* ini, maka metode OLS tidak bisa digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien. Metode yang tepat digunakan untuk mengestimasi model *random effect* adalah GLS.

4) Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel

Pemilihan model untuk estimasi regresi data panel dapat dilakukan secara formal dan informal. Secara infromal pemilihan dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Seperti yang dilakukan oleh Judge mengenai perbedaan mendasar untuk menentukan pilihan antara pendekatan *fixed effect* dan *random effect*, yaitu (Sofyan Yamin: 255):

a. Jika T (jumlah data *time series*) besar dan N (jumlah data *cross section*) kecil, akan terdapat sedikit perbedaan nilai estimasi parameter antara *fixed effect* dengan *random effect*. Pada kasus ini *fixed effect* mungkin lebih disukai.
b. Ketika N lebih besar dari pada T, *random effect* lebih cocok digunakan bila unit *cross section* sampel adalah random/acak. Sedangkan bila kita sangat yakin dan percaya bahwa individu/*cross section* sampel tidak acak, maka *fixed effect* lebih cocok digunakan.
c. Jika komponen eror individu μi dan satu atau lebih variabel bebas berkorelasi, estimasi *random effect* akan bias, sedangkan yang diperoleh *fixed effect* tidak bias.
d. Jika N besar dan T kecil, serta jika asumsi untuk *random effect* terpenuhi, maka *random effect* lebih efisien dari pada *fixed effect*.

Sedangkan pemilihan estimasi secara formal, ada tiga prosedur pengujian yang dapat digunakan, yaitu uji statistik F , uji *Langrange Multiplier*, dan uji Hausman.

5) Uji Statistik F

Uji ini digunakan untuk memilih antara pendekatan *common effect* dan *fixed effect*. Kita akan mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan *fixed effect* lebih baik dari pada regresi data panel dengan *common effect*. Hipotesis nolnya adalah model *common effect* lebih baik dari pada *fixed effect*, dengan ketentuan apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka Ho ditolak. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka Ho diterima. Adapun rumus uji statistik F nya adalah sebagai berikut:

$$F = \frac{(SSR_R - SSR_U)/q}{(SSR_U)/(n-k)}$$

Dimana:

SSR_R : *sum of squared residuals* model *common effect*

SSR_U : *sum of squared residuals* model *fixed effect*

q : jumlah restriksi model *common effect*

n : jumlah observasi

k : jumlah parameter model *fixed effect*

6) Uji *Langrange Multiplier*

Uji ini digunakan untuk memilih antara model *common effect* dan *random effect*. Uji *langrange multiplier* ini bisa dilakukan menggunakan aplikasi STATA. Hipotesis nolnya adalah model *common effect* lebih baik dari pada *random effect*, dengan ketentuan apabila nilai statistik LM > nilai

kritis statistik *chi-squares* maka Ho ditolak. Jika nilai statistik LM < nilai kritis statistik *chi-squares* maka Ho diterima.

7) Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara model *fixed effect* dan *random effect*. Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik *chi-squares* dengan *degree of freedom* sebanya *k* dimana *k* adalah jumlah variabel independen. Hipotesis nolnya adalah model *random effect* lebih baik dari pada *fixed effect*, dengan ketentuan apabila nilai statistik Hausman > nilai kritisnya maka Ho ditolak. Jika nilai statistik Hausman < nilai kritisnya maka Ho diterima. Untuk menentukan nilai statistik Hausman, akan digunakan aplikasi Eviews 7.0.

8) Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apakah kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas atau variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Mudrajad Kuncoro, 2004:84).

9) Uji F (pengujian secara simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis nolnya adalah rasio gini, pertumbuhan penduduk, investasi dalam negeri, investasi luar negeri, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketentuannya adalah sebagai berikut :

Jika probabilitas > dari 0,05 maka Ho diterima

Jika probabilitas < dari 0,05 maka Ho ditolak

Atau

JikaF_{hitung}<F_{tabel}maka Ho diterima

Jika F_{hitung}> F_{tabel} maka Ho ditolak

10) Uji t (pengujian secara parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependennya. Rumusan hipotesisnya adalah:

Ho : Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan

Ha : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan

Ho : Komposisi dewan komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan

Ha : Komposisi dewan komisaris Independen berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan

Ho : Ukuran Komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan

Ha : Ukuran Komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan

Ho : Frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan

Ha : Frekuensi rapat dewa komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan

Ho : Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan

Ha : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan dengan keterangan berikut:

Jika probabilitas > dari 0,05 maka Ho diterima

Jika probabilitas < dari 0,05 maka Ho ditolak

Atau

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka Ho diterima

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka Ho ditolak

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemilihan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Daftar Efek Syariah selama periode 2013-2015. Pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *non probability sampling* yaitu metode *purposive sampling* dengan tipe *judgement* sampling. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Prosedur Pemilihan Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah Perusahaan
Populasi Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di JII (*Jakarta Islamic Index*) 2013-2015	33
Perusahaan manufaktur tidak menyampaikan *annual report*/laporan keuangan	(33)
Perusahaan manufaktur tidak menyampaikan data lengkap	(4)
Perusahaan manufaktur yang terpilih sebagai sampel	19
	Jumlah Observasi
Periode 2013-2015 perusahaan manufaktur x 3 tahun	57

Sumber: Hasil pengumpulan data sekunder oleh peneliti

Berikut adalah hasil analisis deskriptif data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini :

Tabel 4.2

Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4	X5
Mean	0.717949	6.673913	2.565217	3.478261	7.695652	16.72393
Median	0.717949	6.000000	2.000000	3.000000	6.500000	16.69037
Maximum	0.846154	12.00000	6.000000	7.000000	24.00000	20.42615
Minimum	0.641026	4.000000	2.000000	3.000000	2.000000	13.97964
Std. Dev.	0.036762	1.592403	0.860289	0.912606	4.902922	1.369941
Skewness	0.954870	1.314387	2.019223	2.104541	1.037984	0.496578
Kurtosis	5.684646	5.277298	7.717832	7.137973	3.875623	3.819481
Jarque-Bera	20.80432	23.18503	73.92004	66.77513	9.729691	3.177658
Probability	0.000030	0.000009	0.000000	0.000000	0.007713	0.204165
Sum	33.02564	307.0000	118.0000	160.0000	354.0000	769.3007
Sum Sq. Dev.	0.060815	114.1087	33.30435	37.47826	1081.739	84.45321
Observations	46	46	46	46	46	46

Sumber: *data diolah Eviews 7*, 2016

B. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, data variabel dependen yaitu *Corporate Social Responsibility* perusahaan dengan 19 perusahaan (*cross section*) dan data variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, frekuensi rapat dewan komisaris, dan ukuran perusahaan yang diamati pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 (*time series*). Penelitian ini mengandung dimensi tempat dan waktu atau dengan kata lain merupakan kombinasi data *time series* dan *cross section* sehingga disebut data panel. Dengan demikian, teknik regresi yang digunakan adalah model regresi data panel.

Seperti yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dalam menentukan model regresi data panel yang paling tepat (*common effect, fixed effect atau random effect*), terlebih dahulu dilakukan uji Likelihood Ratio, uji *Langrange Multiplier* dan uji Hausman.

1. **Uji *Likelihood Ratio***

Uji statistik F dilakukan untuk menguji apakah penambahan variabel dummy menyebabkan *residual sum of squares* menjadi menurun atau tidak. Hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.3

Uji Likelihood Ratio

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.335664	(18.33)	0.2294
Cross-section Chi-square	31.19493	18	0.0273

Sumber : *Data sekunder diolah*, 2016

Berdasarkan hasil uji likelihood ratio diatas, diperoleh nilai Cross-section Chi-square sebesar 0,0273 sedangkan nilai Ftabel pada α 5% Sehingga dapat dinyatakan bahwa 0,0273< 0,05 dan Ho ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect*. Maka model *fixed effect* lebih baik dari pada model *common effect.*

2. Uji Haussman

Untuk mengetahui apakah model *random effect* lebih baik daripada *fixed effect*, digunakan uji Hausman. Pertimbangan pemilihan pendekatan regresi terbaik dilihat berdasarkan nilai probabilitasnya. Pengujian ini menggunakan aplikasi EVIEWS 7 dan diperoleh hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.4

Hasil Uji Haussman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.458657	5	0.1327

Sumber : *Data sekunder diolah*, 2016

Berdasarkan uji Haussman dengan menggunakan EVIEWS 7 diperoleh nilai *chi-squares* 8.458657 dengan probabilitas sebesar 0.1327 dengan df sebesar 5. Dengan keterangan, H_0= *Random Effect* lebih baik, H_1 = *fixed effect* Lebih baik, tolak H_0 jika probabilitas < 0,05, terima H_0 jika probabilitas < 0,05 Berdasarkan nilai Probabilitas *chi-squares* sebesar 0.1327 dapat dinyatakan bahwa nilai statistik Hausman > nilai kritisnya sehingga H_0 diterima. Maka model *random effect* lebih baik dari pada *fixed effect.*

3. Hasil Regresi Data Panel

Berdasarkan pemilihan model uji statistik F , uji *Langrange Multiplier* dan uji Hausman maka terpilihlah model *random effect*. Jadi untuk menganalisis *Good Corporate Governance* dan ukuran perusahaan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan yaitu

perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index digunakan model *random effect.*

Tabel 4.5

Hasil Regresi data panel Model *Random Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.741976	0.04933	15.04121	0
X1?	0.005409	0.002554	2.118005	0.0391
X2?	0.008664	0.003806	2.276293	0.0271
X3?	0.01198	0.005159	2.321923	0.0243
X4?	0.000256	0.001076	0.237796	0.813
X5?	-0.00781	0.002782	-2.80714	0.0071

Sumber : *Data sekunder diolah*, 2016

Dari hasil pengolahan data diatas diperoleh persamaan sebagai berikut:

$Y = 0.741976 + 0{,}0541X_1 + 0{,}08664X_2 + 0{,}0112X_3 + 0{,}000256X_4 - 0{,}00781X_5$

Dimana:

Y : pengungkapan CSR perusahaan

X_1: Ukuran Dewan Komisaris perusahaan

X_2 : Ukuran Dewan Komisaris Independen perusahaan

X_3 : Ukuran Komite Audit

X_4 : Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

X_5 : Ukuran perusahaan

a. Ukuran dewan Komisaris (X_1)

Besarnya koefisien regresi ukuran dewan komisaris sebesar 0,005409 dengan Probabilitas sebesar 0.0391 dengan tingkat kesalah yang ditoleransi oleh peneliti sebesar 5%, maka 0,0391<0,05 sehingga variabel ukuran dewab komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Lalu koefisien bernilai positif artinya semakin tinggi ukuran dewan komisaris maka pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan juga semakin tinggi.

b. Komposisi Dewan Komisaris Independen (X_2)

Besarnya koefisien regresi Komposisi Dewan Komisaris Independen sebesar 0,008664 dengan Probabilitas sebesar 0.0271 dengan tingkat kesalah yang ditoleransi oleh peneliti sebesar 5%, maka 0.0271 < 0,05 sehingga variabel Komposisi Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Lalu koefisiennya bernilai positif artinya semakin tinggi komposisi dewan komisaris independen maka pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan juga semakin tinggi.

c. Ukuran Komite Audit (X_3)

Besarnya koefisien regresi ukuran komite audit sebesar 0,011988 dengan Probabilitas sebesar 0.0243 dengan tingkat kesalah yang ditoleransi oleh peneliti sebesar 5%, maka 0.0243 < 0,05 sehingga variabel ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Lalu koefisiennya

bernilai positif artinya semakin tinggi ukuran komite audit maka pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan juga semakin tinggi.

d. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (X_4)

Besarnya koefisien regresi frekuensi rapat dewan komisaris sebesar 0,000256 dengan Probabilitas sebesar 0.813 dengan tingkat kesalah yang ditoleransi oleh peneliti sebesar 5%, maka 0.813 > 0,05 sehingga variabel frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

e. Ukuran Perusahaan (X_5)

Besarnya koefisien regresi ukuran Ukuran Perusahaan sebesar -0,007810 dengan Probabilitas sebesar 0.0071 dengan tingkat kesalah yang ditoleransi oleh peneliti sebesar 5%, maka 0.0071 < 0,05 sehingga variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Lalu koefisiennya bernilai negatif artinya semakin tinggi Ukuran Perusahaan maka pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan juga semakin rendah.

C. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang telah dibuat sesuai dengan hasil penelitian atau tidak. Uji hipotesis melalui beberapa uji sebagai berikut:

1. Uji F (pengujian secara simultan)

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Cara untuk

mengetahuinya adalah dengan membandingkan nilai probabilitas F-statistic terhadap taraf nyata yang ditetapkan yaitu 0,05. Pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh secara simultan ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, rapat dewan komisaris, dan Ukuran perusahaan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* tahun 2013 -2015 dapat dilihat dari hasil uji F.

Hipotesis untuk uji simultan F adalah sebagai berikut :

H_0 : Diduga tidak terdapat pengaruh secara simultan ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, rapat dewan komisaris, dan Ukuran perusahaan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index.*

H_a : Diduga terdapat pengaruh secara simultan ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, rapat dewan komisaris, dan Ukuran perusahaan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index*.

Tabel 4.6

Hasil Uji F

F-Statistik	9.208341
Prob(F-statistik)	0.000003

Dari tabel diatas dengan melihat probabilitas yang lebih kecil dari alfa 5% (0.000003 < 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan

menerima H_a yang berarti terdapat pengaruh secara simultan ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, rapat dewan komisaris, dan Ukuran perusahaan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* tahun 2013-2015.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi untuk mengukur seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7

Koefeisien Determinasi

R-squared	0.474453
Adjusted R-squared	0.422929
S.E. of regression	0.028242
F-statistic	9.208341
Prob(F-statistic)	0.000003

Sumber : *Data sekunder diolah*, 2016

Berdasarkan nilai *Adjusted R-squared* pada tabel model random efect di atas, diperoleh nilai sebesar 0.422929 yang mengartikan bahwa ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, rapat dewan komisaris, dan Ukuran perusahaan mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sebesar

42,03%, Sisanya sebesar 57,97% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model.

3. **Uji t (pengujian secara parsial)**

Uji t (uji parsial) pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam mempengaruhi variabel dependen. Kriteria pengujian dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (signifikansi/sig.) Ketentuan tentang pengambil keputusan adalah :

Jika Probabilitas > 0,05 maka Variabel X_n Berpengaruh terhadap Variabel Y

Jika Probabilitas < 0,05 maka Variabel X_n Berpengaruh terhadap Variabel Y

Hasil dari uji T dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8

Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Kesimpulan
C	0.741976	0.04933	15.04121	0	
X1	0.005409	0.002554	2.118005	0.0391	Berpengaruh
X2	0.008664	0.003806	2.276293	0.0271	Berpengaruh
X3	0.01198	0.005159	2.321923	0.0243	Berpengaruh
X4	0.000256	0.001076	0.237796	0.813	Tidak Berpengaruh
X5	0.00781	0.002782	-2.80714	0.0071	Berpengaruh

Sumber : *Data sekunder diolah*, 2016

a. Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama penelitian ini menduga bahwa Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index*. Berdasarkan hasil dari tabel diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi ukuran dewan komisaris sebesar 0,0391 < 0,05. nilai probabilitas (signifikansi) dari ukuran dewan komisaris lebih kecil dari nilai α *(alpha*/tingkat kepercayaan) sebesar 5% (0,05) dan nilai koefisiennya bernilai positif menunjukan bahwa semakin tinggi ukuran dewan komisaris maka pengungkapan CSR nya juga semakin tinggi. Sehingga ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index*.

b. Pengujian hipotesis kedua

Hipotesis kedua penelitian ini menduga bahwa komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index*. Berdasarkan hasil dari tabel diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi ukuran dewan komisaris sebesar 0,0271 < 0,05. nilai probabilitas (signifikansi) dari komposisi dewan komisaris independen lebih kecil dari nilai α (*alpha*/tingkat kepercayaan) sebesar 5% (0,05) dan nilai koefisienya bernilai positif menunjukan semakin tinggi komposisi dewan komisaris independen maka pengungkapan CSR perusahaan juga semakin tinggi. Menunjukan bahwa ukuran dewan

komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index*.

c. Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga penelitian ini menduga bahwa ukuran komie audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index*. Berdasarkan hasil dari tabel diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi ukuran komie audit sebesar 0.0243 < 0,05. nilai probabilitas (signifikansi) dari ukuran komie audit lebih kecil dari nilai α (alpha/tingkat kepercayaan) sebesar 5% (0,05) dan nilai koefisien dari ukuran komite audit bernilai positif menunjukan semakin tinggi ukuran komite audit maka pengungkapan CSR perusahaan juga semakin tinggi. Menunjukan bahwa ukuran komie audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index*.

d. Pengujuan Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat penelitian ini menduga bahwa frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index*. Berdasarkan hasil dari tabel diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi frekuensi rapat dewan komisaris sebesar 0.813 > 0,05. nilai probabilitas (signifikansi) dari ukuran komie audit lebih besar dari nilai α (alpha/tingkat kepercayaan) sebesar 5% (0,05).

Menunjukan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index*.

e. Pengujian Hipotesis Kelima

Hipotesis kelima penelitian ini menduga bahwa ukuran perusahaan berpengaruh dan signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index*. Berdasarkan hasil dari tabel diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi ukuran perusahaan sebesar 0.0071 < 0,05. nilai probabilitas (signifikansi) dari ukuran komie audit lebih kecil dari nilai α (alpha/tingkat kepercayaan) sebesar 5% (0,05) namun nilai koefisien dari ukuran perusahaan bernilai negatif menunjukan semakin tinggi ukuran perusahaan maka pengungkapan CSR perusahaan malah semakin rendah. Menunjukan bahwa ukuran komie audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index*.

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang didasarkan pada hasil rumusan masalah yang dibuat, pemaparan teori, pengembangan hipotesis dan pengolahan data, maka penelitian ini ada beberapa hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Perusahaan

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukan bahwa variabel Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan dapat diterima.

Agency Theory dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen. Melalui peran monitoring oleh Dewan Komisaris, perusahaan dapat berjalan sesuai peraturan yang berlaku dan dapat terjamin kelangsungannya(Waryanto, 2010:45). Dengan demikian jika dikaitkan dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan, dapat dikatan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris, maka komposisi pengalaman, keahlian, dan pengawasan yang dimiliki oleh dewan komisaris semakin meningkat, sehingga dapat melakukan aktivitas monitoring dengan lebih baik, maka diharapkan pengungkapan CSR akan semakin luas karenan kemungkinan manajer untuk menyembunyikan informasi menjadi lebih kecil.

2. Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Perusahaan

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukan bahwa variabel komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa kom[osisi dewan

komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan dapat diterima.

Dewan komisaris independen dianggap sebagai mekanisme pengendalian *intern* tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Jika dikaitkan dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan kebanyakan penelitian menunjukan adanya hubungan positif antara dewan komisaris independen dengan tingkat pengungkapan informasi oleh perusahaan (Ahmad nurkhin, 2010). Dengan demikian, tujuan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari stakeholders dengan mengungkapkan tanggung jawab sosial akan dapat diperoleh karena keberadaan dewan komisaris independen akan memberikan pengendalian dan pengawasan.

3. Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Perusahaan

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukan bahwa variabel Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan dapat diterima.

Keberadaan komite audit dapat dirasakan sebagai indikasi pengawasan dan berpengaruh signifikan dalam menyediakan informasi yang lebih kepada pemakai laporan keuangan. Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengawasan, sehingga dapat

mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan laporan perusahaan, termasuk pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (Yunita ratnasari, 2011:75). Ho dan Wong dalam yuanita menyatakan bahwa keberadaan komie audit berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

4. Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Perusahaan

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukan bahwa variabel frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan tidak dapat diterima.

Rapat dewan komisaris merupakan media komunikasi diantara anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas manajemen. Semakin baiknya mekanisme pengawasan perusahaan berpengaruh terhadao meningkatnya kualitas laporan keuangan perusahaan, termasuk pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Waryanto , 2010:46).

5. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Perusahaan

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukan bahwa variabel Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan tidak dapat diterima.

Berpengaruh negatifnya ukuran perusahaan ini dapat disebabkan karena perusahaan-perusahaan yang terdapat dalam JII memiliki tingkat kebutuhan aset yang berbeda. Sebagai contoh, PT Alam Sutra Realty, Tbk. memiliki aset yang besar dalam hal *property*. Berbeda halnya dengan PT Unilever Indonesia, Tbk. yang memliki pos aset terbesar untuk persediaan mereka. Hal ini dikarenakan kedua contoh perusahaan diatas memiliki perbedaan jenis industri sehingga dimungkinkan untuk perbedaan dalam pengelolaan asetnya.

Dalam penelitian ini pengungkapan CSR digunakan alat ukur skor penerapan CSR. Alat ukur ini menggunakan indikator-indikator variabel yang mengacu pada beberapa komponen pengungkapan *coporate social responsibility* yaitu Indikator Lingkungan, Indikator Energi, Indikator Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja, Indikator Lain-lain Tentang Tenaga Kerja, Indikator Produk, Indikator Keterlibatan Masyarakat, Indikator Umum (Eddy Rismanda Sembiring, 2005:385) . Dari alat ukur tersebut maka mungkin suatu perusahaan hanya berfokus padabeberapa indikator saja yang berkenaan dengan perusahaan tersebut jadi belum tentu ukuran perusahaan yang besar meningkatkan pengungkapan CSR perusahaan, malah bisa saja ukuran perusahaan yang besar menurunkan tingkat pengungkapan CSR secara menyeluruh dan malah hanya berfokus pada beberapa indikator yang dianggap vital dan penting bagi perusahaan untuk dilakukan program tanggung jawab sosial ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Corporate Socila Responibility* perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* tahun 2013-2015. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *non probability sampling* yaitu metode *purposive sampling* dengan tipe *judgement sampling* dan akhirnya didapat 19 perusahaan dengan periode tiga tahun yaitu mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, sehingga total sampelnya adalah 57 perusahaan manufaktur. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data *cross section* dan *time series* tahun perusahaan manufaktur yang terdaftar di *jakarta islamic index* tahun 2013-2015. Kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ukuran Dewan Komisaris dengan proksi jumlah dewan komisaris termasuk dewan komisaris independen terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2013-2015. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Berdasarkan teori agensi dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen. Melalui peran monitoring oleh Dewan Komisaris, perusahaan dapat berjalan sesuai peraturan yang berlaku dan dapat

terjamin kelangsungannya Jika dikaitkan dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan, semakin besar ukuran dewan komisaris, maka komposisi pengalaman, keahlian, dan pengawasan yang dimiliki oleh dewan komisaris semakin meningkat, sehingga dapat melakukan aktivitas monitoring dengan lebih baik, maka diharapkan pengungkapan CSR akan semakin luas karenan kemungkinan manajer untuk menyembunyikan informasi menjadi lebih kecil.

2. Komposisi dewan komisaris independen dengan proksi jumlah dewan komisaris independen perusahaan terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2013-2015. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Hal ini dikarenakan tujuan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari stakeholders dengan mengungkapkan tanggung jawab sosial akan dapat diperoleh karena keberadaan dewan komisaris independen akan memberikan pengendalian dan pengawasan.
3. Ukuran komite audit dengan proksi jumlah anggota komite audit perusahaan terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2013-2015. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengawasan, maka dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan laporan perusahaan, termasuk pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.

4. Frekuensi rapat dewan komisaris dengan proksi jumlah rapat dewan komisaris yang diadakan selama satu periode perusahaan terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2013-2015. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak.
5. Ukuran perusahaan dengan proksi total *asset* selama satu tahun periode perusahaan terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2013-2015. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Periode waktu penelitian yang digunakan hanya 3 tahun yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, karena data yang dibutuhkan penelitian pada tahun 2016 belum dipublikasikan pada website IDX.
2. Memperpanjang periode waktu pengamatan penelitian dan menggunakan periode terkini, sebab semakin lama periode waktu pengamatan dan menggunakan periode terkini yang dilakukan maka akan semakin besar kesempatan untuk memperoleh informasi tentang data variabel yang handal sehingga penelitian yang dilakukan dapat mencapai hasil yang lebih baik.

3. Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam JII periode 2013-2015 berjumlah 57 sampel, diharapkan pada penelitian selanjutnya jumlah sampel yang digunakan lebih banyak.
4. Model yang dikembangkan dalam penelitian ini masih terbatas pada pengaruh ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, frekuensi rapat dewan komisaris, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan. Mungkin masih banyak faktor lain yang berpengaruh juga terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan karena melihat dari hasil koifisien determinasinya yang masih 42,03%, Sisanya sebesar 57,97% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model sehingga masih banyak terdapa variabel lain yang mempengaruhi. Oleh karena itu, diperlukan studi lanjutan dengan data dan metode yang lebih lengkap sehingga dapat melengkapi hasil penelitian yang telah dilakukan dan hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan berbagai pihak yang terkait dengan pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index*.

C. Saran

Berdasarkan penelitian tentang pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilkan institusional dan ukuran perusahaan terhadap *corporate social responsibility* pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index*, penulis menyarankan:

1. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin lebih jauh meneliti tentang CSR, agar menggunakan data yang lebih mencerminkan keseluruhan nilai

perusahaan dengan menambahkan variabel bebas lainnya yang tidak terdapat pada penelitian ini.

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah variabel independen, sehingga penelitian yang dilakukan lebih akurat dan tidak berfokus hanya dengan variabel yang tidak signifikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

HALAMAN MOTTO ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xvi**

DAFTAR TABEL ..... **xixi**

DAFTAR GAMBAR ..... **xxi**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

D. Sistematika Pembahasan 10

BAB II LANDASAN TEORI **12**

A. Telaah Pustaka 12

B. KerangkaTeori 14

1. Teori Sinyal (*Signaling Theory*) 14
2. Teori Keagenan (*Agency Theory*) 14
3. Teori Asimetri (*Asimetri Theory*) 17
4. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*) 18
5. Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)..... 18
6. *Corporate Social Responsibility* 19
   a) Definisi*Corporate Social Responsibility* 20
   b) Manfaat*Corporate Social Responsibility*..... 22
   c) *Corporate Social Responsibility* dalam Islam..... 23
7. *Good Corporate Governance* 24
   a) Definisi *Good Corporate Governance* 24
   b) Asas *Good Corporate Governance*..... 26
   c) Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* 28
   d) *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam. 28
8. Dewan Komisaris..... 29
9. Dewan Komisaris Independen 29
10. Komite Audit 31
11. Ukuran Perusahaan 32

C. Kerangka Pemikiran..... 33
D. Hubungan Antar Variabel Dengan Hipotesis 34

BAB III METODE PENELITIAN 39

A. Tujuan Riset dan Jenis Pengujian Riset 39

B. Dimensi Waktu Riset 39

C. Populasi dan Sampel 40

D. Teknik Pengambilan Data 41

E. Definisi Opersional Variabel 41

1. Variabel Dependen 41

2. Variabel Independen 43

F. Teknik Analisis Data 44

1. *Common Effect* 44

2. *Fixed Effect* 45

3. *Random Effect* 46

G. Pemilihan Teknik Regresi Data Panel 46

1. Uji Statistik F 48

2. Uji *Langrange Multiplier* 48

3. Uji Hussman 49

4. Analisis Koefisien Determinasi 49

5. Uji F 50

6. Uji t 50

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 52

A. Pemilihan Sampel 52

B. Hasil 54

1. Uji *Likelihood Ratio* 55

2. Uji Hausman 56

3. Hasil Regresi Data Panel 56

C. Uji Hipotesis 59

4. Uji F 59

5. Koefisien Determinasi 61

6. Uji t 62

D. Pembahasan 65

1. Pengaruh UkuranDewan Komisaris Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Perusahaan. 65

2. Pengaruh KomposisiDewanKomisaris Independen Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Perusahaan 66

3. Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Perusahaan 67

4. Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*Perusahaan 68

5. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Perusahaan 68

BAB V PENUTUP 70

A. Kesimpulan 70

B. Keterbatasan Penelitian 72

C. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN – LAMPIRAN xxiv

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Prosedur Pemilihan Sampel Penelitian 53

Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif..... 54

Tabel 4.3 Hasil Uji Likelihood Ratio..... 55

Tabel4.4 Hasil Uji Haussman 55

Tabel 4.5 Hasil Regresi Data Panel Model *Randoom Effect* 56

Tabel 4.6 Hasil Uji F..... 60

Tabel 4.7 Koofisien Determinasi 61

Tabel 4.8 Hasil Uji T..... 62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 KerangkaBerpikir 33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rekapitulasi Data i

Lampiran 2 Grafik Data Variabel X&Y ii

Lmapiran 3 Analisis Deskriptif..... iii

Lampiran 4 Hasil Uji Regresi Data Panel *Common Effect* iv

Lampiran 5 Hasil Uji Regresi Data Panel *Fixed Effect* v

Lampiran 6 Hasil Uji Regresi Data Panel *Random Effect* vi

Lampiran 7 HasilUji Likelihood Ratio vii

Lampiran 8 HasilUji Haussman..... viii

Lampiran 9 HasilUji *Langrage Multyplier* ix

DAFTAR PUSTAKA

A. AL QUR`AN

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

B. Referensi Buku

Arifin, Zaenal, *Teori Keuangan dan Pasar Modal*, Yogyakarta: Ekonisia , 2007.

Agus, Sartono, "Manajemen Keuangan : Teori dan Aplikasi", Yogyakarta: BPFE, 1994.

Effendi, Muhammad Arief, The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi, Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang : Badan Penerbit Diponegoro, 2006.

Hadi, Syamsul, *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keunagan,* Yogyakarta : EKONISIA, 2006.

Hadi, Nor, "*Corporate Social Responsibility*", Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011

Harsanti, Ponny, "Corporate Social Responsibility Dan Teori Legitimasi," MAWAS, 2011.

Muhammad & R. Lukman Farouni, Visi Al-Quran tentang Etika dan Bisnis, Jakarta: Salemba Diniyah 2009.

Suharto, Edi, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR* , Bandung: Alfabeta, 2009.

Sutedi , Adrian, *Good Corporate Governance*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Suadjana, *Metoda Statistika*, Bandung: Penerbit Tarsito, 2002.

Sawir ,Agnes, Kebijakan Pendanaan dan Restrukturisasi Perusahaan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Surya , Indra dan Ivan Yustiavandana. *Pengaruh Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha.* Jakarta : Kencana 2010.

Untung Hendrik Budi, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Weston dan Brigham, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan,* Jakarta: Erlangga, 1998.

C. Jurnal dan Skripsi

Andre Christian Sitepu "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial Dalam Laporan Tahunan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta." 2009.

David Tjondro dan R wilopo, "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas dan Kinerja Saham Perusahaan Perbankan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia." *Journal of Business and Banking*, Vol 1: 1 (May 2011)

Fahrizi, Anggara."Faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan *Corporate Socil Responsibility*(CSR) dalam laporan Tahunan Perusahaan" *Skripsi.* Fakultas Ekonomi UNDIB Semarang 2010.

Jama'an."Pengaruh Mekanisme Cirporate Governance, dan Kualitas Kantor Akuntan Publik Terhadap Integritas Informasi Laporan Keuangan". Jurnal Universitas Diponegoro Semarang 2008.

Hamonangan Siallagan dan Mas'ud Machfoedz, "Mekanisme Corporae Governance, Kualias Laba dan Nilai Perusahaan," *Simposium Nasional Akuntansi IX,* Padang, 23-26 Agustus 2006.

Marihot Nasution dan Doddy Setyawan, "Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia." *Simposium Nasional Akuntansi X,* Unhas Makasar, 26-28 Juli 2007.

Nawifah, Himatun."Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Perusahaan *Manufakture* yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah Tahun 2007-2009" *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Yogyakarta 2014.

Nurkhin, Ahmad. 2009. "Corporate Governance dan Profitabilitas; Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia)". Tesis. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.

Setyarini, Yulia & Paramitha, Melvie. 2011. Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Corporate Social Responsibility. Jurnal Kewirausahaan Vol. 5 No. 2 , Desember 2011. ISSN. 1978-4724.

Waryanto, "*Pengaruh Corporate Governance (GCG) terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di dalam Sustanbility Repoert*." Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang 2010.

D. WEBSITE

www.IDX.co.id
www.madani-ri.com

KATA PENGANTAR

Kami memuji-Mu, duhai Dzat yang memang telah terpuji sebelum dipuji oleh para pemuji. Kami mengharapkan ampunan-MU, duhai Dzat yang ampunan-Nya diharapkan oleh kami manusia yang dzalim dan penuh dosa. Kami memohon perlindungan-Mu, duhai Dzat yang menjadi tempat perlindungan orang-orang yang takut. Puji syukur untuk-Mu., wahai Tuhan, atas limpahan karunia-Mu yang begitu besar dan curahan anugerah-Mu yang tiada terkira. Ya Allah, sampaikan shalawat dan salam kepada hamba dan rasul-Mu yang mulia, Muhammad Ibnu Abdullah, sang revolusioner sejati yang syafa"atnya senantiasa kami nanti.

Beribu Syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penyusun atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penyusun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penyusun menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul: " **Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan (Yang terdaftar Di Jakarta *Islamic Index* Tahun 2012-2015)**" yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT yang diberikan kepada penyusun.

Selanjutnya, penyusun sadari skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya laporan ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Bapak Prof Drs KH Yudian Wahyudi PhD selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag, M.Ag.. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, beserta para Pembantu Dekan I, II, dan III beserta staf stafnya.

3. Bapak H. M. Yazid Afandi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Drs. Akhmad Yusuf Khoiruddin, S.E., M.Si. selaku Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen Program Studi Keuangan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik kami dan memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai penulis menyelesaikan studinya.

6. Karyawan TU Program Studi yang dengan sabar melayani penyusun mengurus administrasi akademik.

7. Ayahanda Sigit Parwanto dan Ibunda Dede Rohimah yang senantiasa memanjatkan doanya siang dan malam, memberikan perhatian dan kasih sayang serta dukungan yang tiada henti-hentinya baik moril maupun materil sampai selesainya skripsi ini. dan seluruh keluargaku tercinta yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

8. Semua teman-teman KUI angkatan 2011 atas kebersamaanya dalam menimba ilmu di Yogyakarta serta persahabatan yang telah terjalin selama ini.

9. Dan untuk semua teman-teman saya yang selama proses perkuliahan di Jogja terima kasih atas bantuan kalian semua.

Semoga Allah SWT memberikan barakah atas kebaikan dan jasa-jasa mereka semua dengan rahmat dan kebaikan yang terbaik dari-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya. Aamiin.

Yogyakarta, 23 Agustus 2016

Yunas Dewanta Mutik

NIM. 11390048

Lampiran 1

Rekapitulasi Data

Perusahaan	Tahun	Y	X1	X2	X3	X4	X5
AALI	2013	0,69	7,00	3,00	3,00	4,00	16,52
ADRO	2013	0,72	5,00	2,00	3,00	3,00	15,72
AKRA	2013	0,62	3,00	1,00	3,00	4,00	23,41
ASRI	2013	0,68	6,00	2,00	3,00	4,00	16,48
CPIN	2013	0,77	12,00	4,00	5,00	10,00	16,57
EXCL	2013	0,73	6,00	2,00	4,00	7,00	17,51
ICBP	2013	0,69	8,00	3,00	4,00	4,00	16,87
INCO	2013	0,76	12,00	3,00	3,00	3,00	14,64
INDF	2013	0,72	8,00	3,00	3,00	4,00	18,17
ITMG	2013	0,74	6,00	2,00	3,00	3,00	14,15
JSMR	2013	0,76	5,00	2,00	3,00	12,00	17,16
KLBF	2013	0,67	4,00	2,00	3,00	4,00	16,24
LPKR	2013	0,69	8,00	6,00	3,00	7,00	17,26
LSIP	2013	0,73	8,00	3,00	3,00	5,00	15,89
PTBA	2013	0,69	6,00	2,00	4,00	13,00	16,27
SMGR	2013	0,71	6,00	2,00	5,00	11,00	17,24
TLKM	2013	0,69	3,00	1,00	6,00	5,00	18,67
UNTR	2013	0,64	7,00	3,00	3,00	4,00	17,86
UNVR	2013	0,76	5,00	6,00	3,00	4,00	16,41
AALI	2014	0,73	6,00	4,00	4,00	9,00	16,74
ADRO	2014	0,69	5,00	3,00	3,00	4,00	15,67
AKRA	2014	0,67	4,00	2,00	3,00	7,00	16,51
ASRI	2014	0,71	6,00	2,00	3,00	3,00	16,64
CPIN	2014	0,73	6,00	2,00	3,00	10,00	16,85
EXCL	2014	0,72	7,00	2,00	3,00	9,00	15,67
ICBP	2014	0,72	7,00	3,00	5,00	2,00	17,04
INCO	2014	0,74	10,00	2,00	5,00	3,00	14,66
INDF	2014	0,72	8,00	3,00	3,00	2,00	18,27
ITMG	2014	0,74	6,00	2,00	3,00	2,00	14,09
JSMR	2014	0,68	6,00	2,00	3,00	15,00	14,97
KLBF	2014	0,73	6,00	2,00	3,00	4,00	16,34
LPKR	2014	0,71	9,00	6,00	3,00	9,00	17,45
LSIP	2014	0,72	8,00	3,00	3,00	5,00	15,98
PTBA	2014	0,85	11,00	6,00	6,00	16,00	16,51
SMGR	2014	0,72	7,00	2,00	5,00	12,00	17,35
TLKM	2014	0,65	3,00	1,00	4,00	4,00	18,77
UNTR	2014	0,72	7,00	3,00	3,00	4,00	17,91
UNVR	2014	0,73	5,00	3,00	3,00	4,00	16,47

Perusahaan	Tahun	Y	X1	X2	X3	X4	X5
AALI	2015	0,65	5,00	2,00	3,00	4,00	16,88
ADRO	2015	0,69	5,00	3,00	3,00	3,00	15,60
AKRA	2015	0,69	4,00	2,00	3,00	8,00	16,54
ASRI	2015	0,72	6,00	2,00	3,00	4,00	16,74
CPIN	2015	0,73	6,00	2,00	3,00	9,00	17,02
EXCL	2015	0,72	7,00	2,00	3,00	10,00	15,59
ICBP	2015	0,74	6,00	2,00	3,00	7,00	17,09
INCO	2015	0,73	9,00	2,00	4,00	6,00	14,64
INDF	2015	0,71	8,00	3,00	3,00	8,00	18,34
ITMG	2015	0,76	6,00	2,00	3,00	3,00	13,98
JSMR	2015	0,68	6,00	2,00	3,00	16,00	15,12
KLBF	2015	0,74	7,00	3,00	3,00	5,00	16,43
LPKR	2015	0,71	8,00	5,00	3,00	8,00	17,54
LSIP	2015	0,64	6,00	2,00	3,00	8,00	16,00
PTBA	2015	0,71	6,00	2,00	3,00	12,00	16,64
SMGR	2015	0,71	7,00	2,00	4,00	11,00	17,46
TLKM	2015	0,79	11,00	6,00	5,00	15,00	18,93
UNTR	2015	0,73	6,00	3,00	3,00	5,00	17,94
UNVR	2015	0,72	5,00	3,00	3,00	4,00	16,57

Lampiran 2

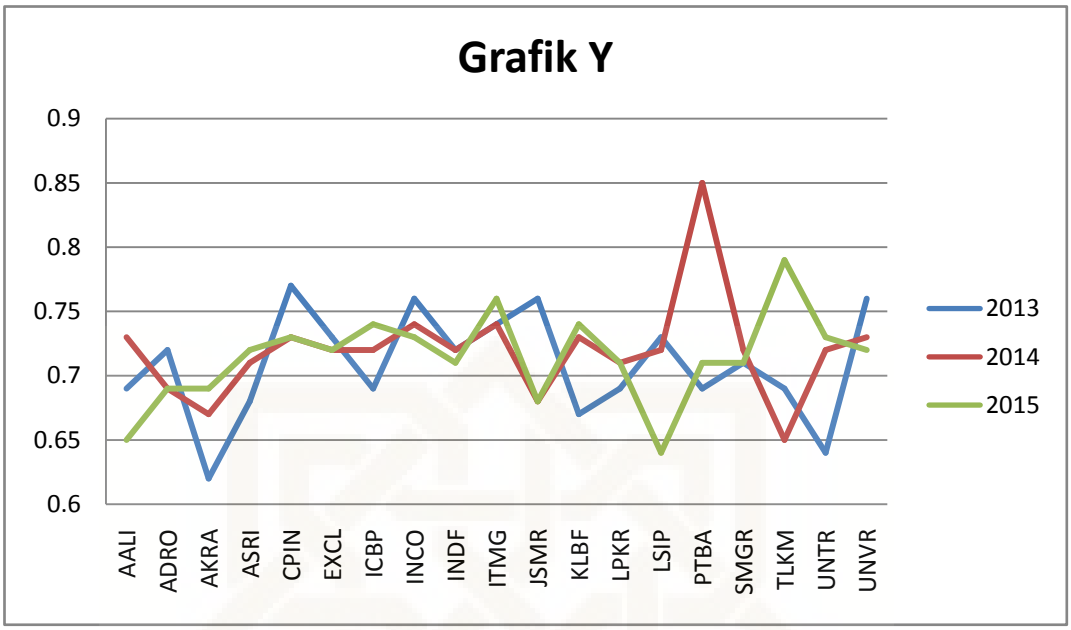
Grafik Y
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
AALI
ADRO
AKRA
ASRI
CPIN
EXCL
ICBP
INCO
INDF
ITMG
JSMR
KLBF
LPKR
LSIP
PTBA
SMGR
TLKM
UNTR
UNVR
2013
2014
2015

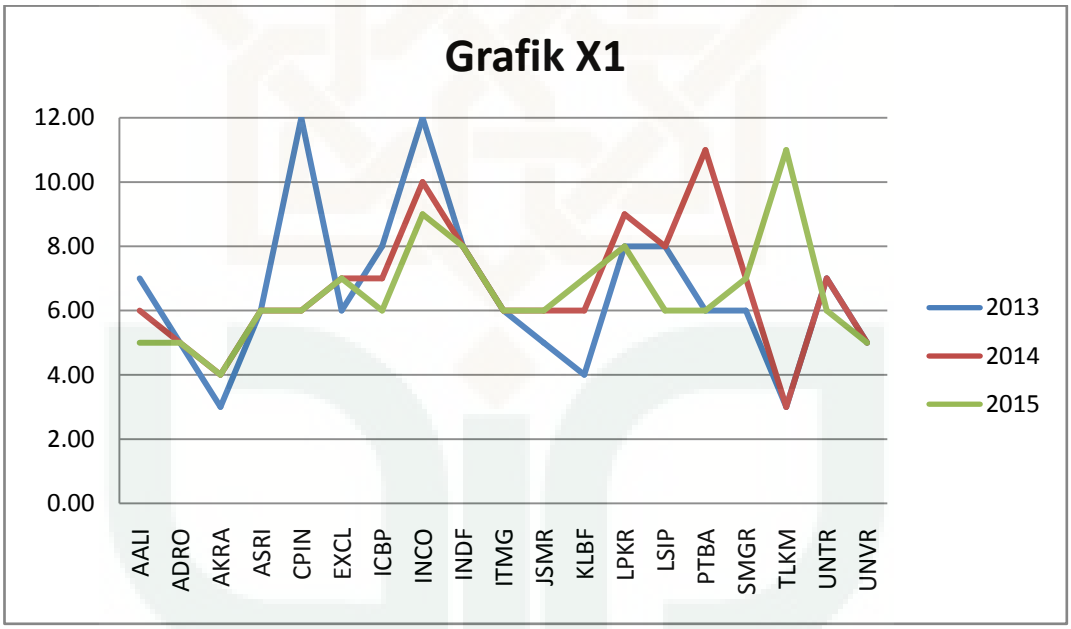
Grafik X1
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
AALI
ADRO
AKRA
ASRI
CPIN
EXCL
ICBP
INCO
INDF
ITMG
JSMR
KLBF
LPKR
LSIP
PTBA
SMGR
TLKM
UNTR
UNVR
2013
2014
2015

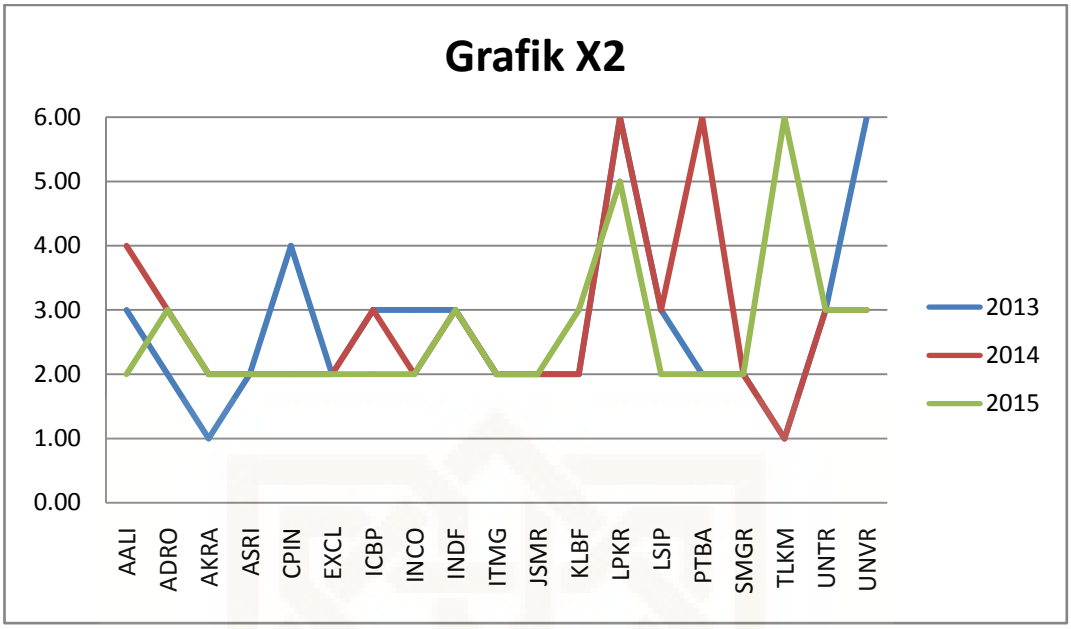
Grafik X2
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
AALI
ADRO
AKRA
ASRI
CPIN
EXCL
ICBP
INCO
INDF
ITMG
JSMR
KLBF
LPKR
LSIP
PTBA
SMGR
TLKM
UNTR
UNVR
2013
2014
2015

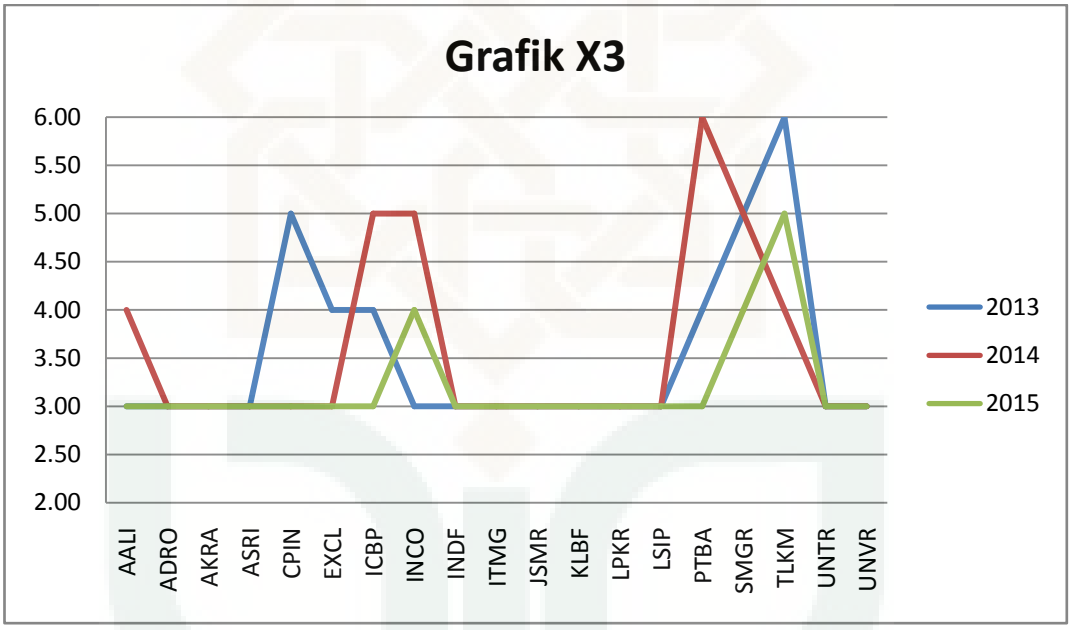
Grafik X3
6.00
5.50
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
AALI
ADRO
AKRA
ASRI
CPIN
EXCL
ICBP
INCO
INDF
ITMG
JSMR
KLBF
LPKR
LSIP
PTBA
SMGR
TLKM
UNTR
UNVR
2013
2014
2015

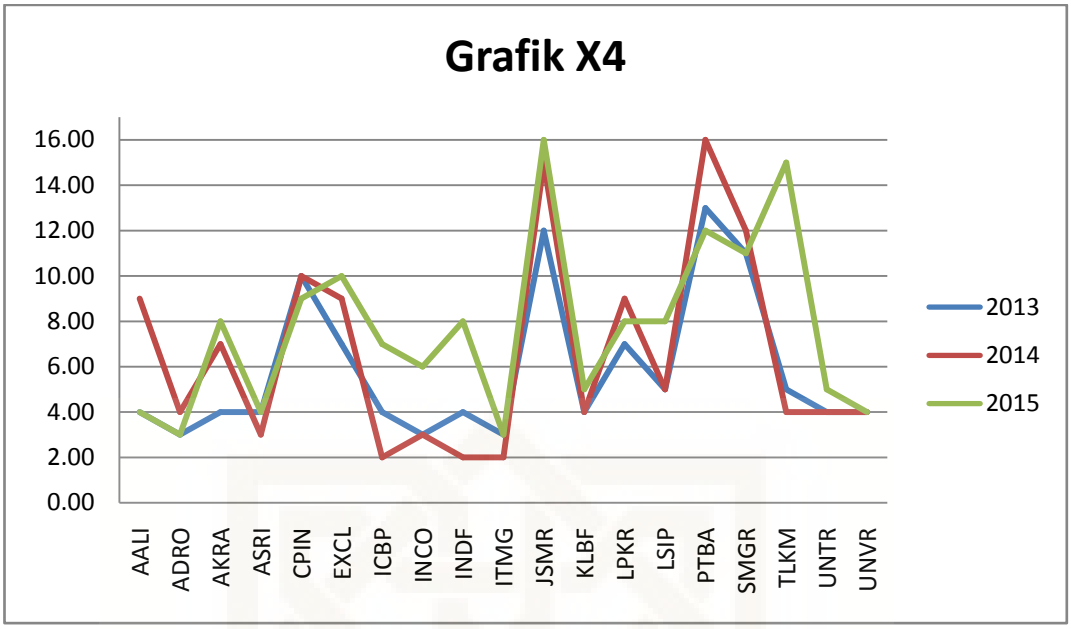
Grafik X4
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
AALI
ADRO
AKRA
ASRI
CPIN
EXCL
ICBP
INCO
INDF
ITMG
JSMR
KLBF
LPKR
LSIP
PTBA
SMGR
TLKM
UNTR
UNVR
2013
2014
2015

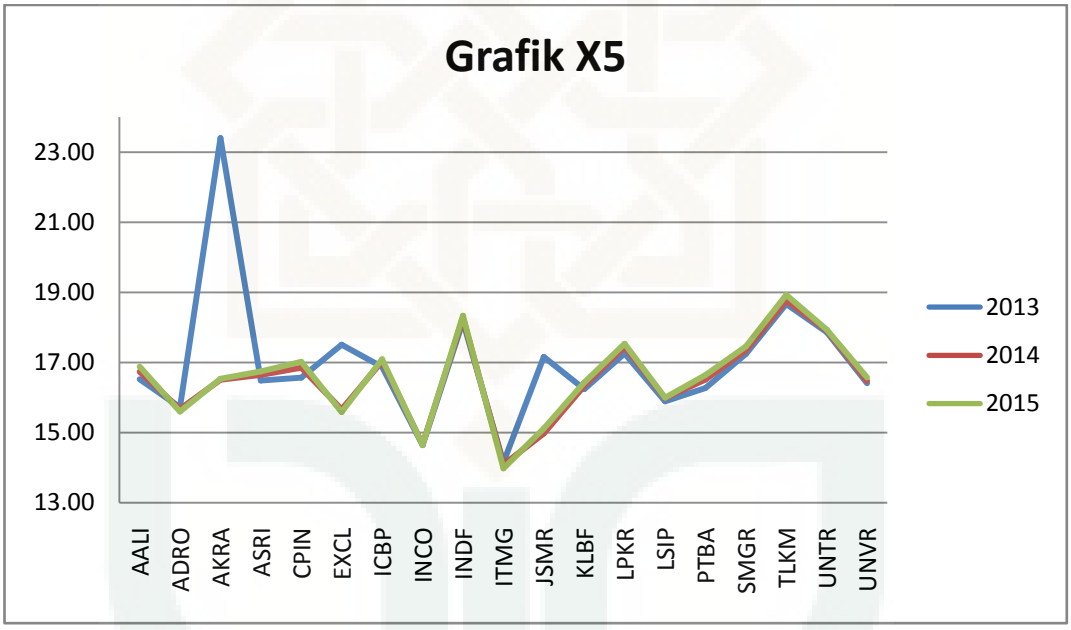
Grafik X5
23.00
21.00
19.00
17.00
15.00
13.00
AALI
ADRO
AKRA
ASRI
CPIN
EXCL
ICBP
INCO
INDF
ITMG
JSMR
KLBF
LPKR
LSIP
PTBA
SMGR
TLKM
UNTR
UNVR
2013
2014
2015

Lampiran 3

Analisis Deskriptif

Variabel Y

	2013	2014	2015
Min	0,62	0,65	0,64
Max	0,77	0,85	0,79
St.Dev	0,04	0,04	0,04
Mean	0,71	0,72	0,71

Variabel X1

	2013	2014	2015
Min	3,00	3,00	4,00
Max	12,00	11,00	11,00
St.Dev	2,46	1,95	1,61
Mean	6,58	6,68	6,53

Variabel X2

	2013	2014	2015
Min	1,00	1,00	2,00
Max	6,00	6,00	6,00
St.Dev	1,37	1,32	1,12
Mean	2,74	2,79	2,63

Variabel X3

	2013	2014	2015
Min	3,00	3,00	3,00
Max	6,00	6,00	5,00
St.Dev	0,90	0,96	0,54
Mean	3,53	3,58	3,21

Variabel X4

	2013	2014	2015
Min	3,00	2,00	3,00
Max	13,00	16,00	16,00
St.Dev	3,24	4,36	3,82
Mean	5,84	6,53	7,68

Variabel X5

	2013	2014	2015
Min	14,15	14,09	13,98
Max	23,41	18,77	18,93
St.Dev	1,90	1,19	1,24
Mean	17,00	16,52	16,58

Lampiran 4

Common Effect

Dependent Variable: Y?
Method: Pooled Least Squares
Sample: 2013 2015
Included observations: 3
Cross-sections included: 19
Total pool (balanced) observations: 57

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1?	0.021077	0.005418	3.890390	0.0003
X2?	-0.000706	0.008731	-0.080904	0.9358
X3?	0.015023	0.012135	1.238021	0.2213
X4?	0.000200	0.002482	0.080764	0.9359
X5?	0.031082	0.002436	12.76040	0.0000

R-squared	-1.850380	Mean dependent var	0.713675
Adjusted R-squared	-2.069640	S.D. dependent var	0.038104
S.E. of regression	0.066759	Akaike info criterion	-2.491817
Sum squared resid	0.231753	Schwarz criterion	-2.312602
Log likelihood	76.01678	Hannan-Quinn criter.	-2.422168
Durbin-Watson stat	0.626850		

Lampiran 5
Fixed Effect

Dependent Variable: Y?
Method: Pooled Least Squares
Sample: 2013 2015
Included observations: 3
Cross-sections included: 19
Total pool (balanced) observations: 57

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.622236	0.086540	7.190168	0.0000
X1?	0.002998	0.004892	0.612825	0.5442
X2?	0.019123	0.008155	2.344979	0.0252
X3?	0.006375	0.007760	0.821608	0.4172
X4?	0.000748	0.002639	0.283561	0.7785
X5?	-0.000435	0.004653	-0.093484	0.9261
Fixed Effects (Cross)				
_AALI--C	-0.023509			
_ADRO--C	-0.002174			
_AKRA--C	-0.022663			
_ASRI--C	0.007744			
_CPIN--C	0.023076			
_EXCL--C	0.021085			
_ICBP--C	0.002381			
_INCO--C	0.023629			
_INDF--C	-0.004592			
_ITMG--C	0.054390			
_JSMR--C	0.004654			
_KLBF--C	0.014565			
_LPKR--C	-0.072269			
_LSIP--C	-0.015313			
_PTBA--C	0.008209			
_SMGR--C	-0.001756			
_TLKM--C	-0.006238			
_UNTR--C	-0.017593			
_UNVR--C	0.006373			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.696833	Mean dependent var	0.713675
Adjusted R-squared	0.485534	S.D. dependent var	0.038104
S.E. of regression	0.027330	Akaike info criterion	-4.066073
Sum squared resid	0.024649	Schwarz criterion	-3.205841
Log likelihood	139.8831	Hannan-Quinn criter.	-3.731757
F-statistic	3.297859	Durbin-Watson stat	2.101414
Prob(F-statistic)	0.000900		

Lampiran 6
Random Effect

Dependent Variable: Y?
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Sample: 2013 2015
Included observations: 3
Cross-sections included: 19
Total pool (balanced) observations: 57
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.741976	0.049330	15.04121	0.0000
X1?	0.005409	0.002554	2.118005	0.0391
X2?	0.008664	0.003806	2.276293	0.0271
X3?	0.011980	0.005159	2.321923	0.0243
X4?	0.000256	0.001076	0.237796	0.8130
X5?	-0.007810	0.002782	-2.807140	0.0071
Random Effects (Cross)				
_AALI--C	-0.002629			
_ADRO--C	-0.000792			
_AKRA--C	-0.001209			
_ASRI--C	0.000286			
_CPIN--C	0.002796			
_EXCL--C	0.001617			
_ICBP--C	-0.000172			
_INCO--C	-0.001252			
_INDF--C	0.001097			
_ITMG--C	0.004074			
_JSMR--C	-0.000197			
_KLBF--C	0.001578			
_LPKR--C	-0.005167			
_LSIP--C	-0.002915			
_PTBA--C	0.001222			
_SMGR--C	-0.001284			
_TLKM--C	0.000380			
_UNTR--C	-0.000644			
_UNVR--C	0.003210			

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.006331	0.0509
Idiosyncratic random	0.027330	0.9491

Weighted Statistics

R-squared	0.474453	Mean dependent var	0.662348
Adjusted R-squared	0.422929	S.D. dependent var	0.037177
S.E. of regression	0.028242	Sum squared resid	0.040678
F-statistic	9.208341	Durbin-Watson stat	1.572634
Prob(F-statistic)	0.000003		

Unweighted Statistics

R-squared	0.475576	Mean dependent var	0.713675
Sum squared resid	0.042639	Durbin-Watson stat	1.500309

Lampiran 7
Likelihood Ratio

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: POOL
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.335664	(18,33)	0.2294
Cross-section Chi-square	31.194930	18	0.0273

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: Y?
Method: Panel Least Squares
Sample: 2013 2015
Included observations: 3
Cross-sections included: 19
Total pool (balanced) observations: 57

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.748598	0.049752	15.04667	0.0000
X1?	0.005280	0.002570	2.054763	0.0450
X2?	0.008345	0.003828	2.180294	0.0339
X3?	0.012291	0.005257	2.338052	0.0233
X4?	0.000229	0.001074	0.212838	0.8323
X5?	-0.008157	0.002813	-2.899791	0.0055

R-squared	0.475962	Mean dependent var	0.713675
Adjusted R-squared	0.424586	S.D. dependent var	0.038104
S.E. of regression	0.028904	Akaike info criterion	-4.150372
Sum squared resid	0.042608	Schwarz criterion	-3.935314
Log likelihood	124.2856	Hannan-Quinn criter.	-4.066793
F-statistic	9.264231	Durbin-Watson stat	1.529067
Prob(F-statistic)	0.000003		

Lampiran 8
Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: POOL
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.458657	5	0.1327

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1?	0.002998	0.005409	0.000017	0.5634
X2?	0.019123	0.008664	0.000052	0.1470
X3?	0.006375	0.011980	0.000034	0.3336
X4?	0.000748	0.000256	0.000006	0.8381
X5?	-0.000435	-0.007810	0.000014	0.0480

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: Y?
Method: Panel Least Squares
Date: 06/24/16 Time: 11:39
Sample: 2013 2015
Included observations: 3
Cross-sections included: 19
Total pool (balanced) observations: 57

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.622236	0.086540	7.190168	0.0000
X1?	0.002998	0.004892	0.612825	0.5442
X2?	0.019123	0.008155	2.344979	0.0252
X3?	0.006375	0.007760	0.821608	0.4172
X4?	0.000748	0.002639	0.283561	0.7785
X5?	-0.000435	0.004653	-0.093484	0.9261

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.696833	Mean dependent var	0.713675
Adjusted R-squared	0.485534	S.D. dependent var	0.038104
S.E. of regression	0.027330	Akaike info criterion	-4.066073
Sum squared resid	0.024649	Schwarz criterion	-3.205841
Log likelihood	139.8831	Hannan-Quinn criter.	-3.731757
F-statistic	3.297859	Durbin-Watson stat	2.101414
Prob(F-statistic)	0.000900		

Lampiran 9

Uji *Langrange Multiplier*

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	3.672006	Prob. F(2,50)	0.0325
Obs*R-squared	7.058600	Prob. Chi-Square(2)	0.0293

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 06/27/16 Time: 12:41
Sample: 1 57
Included observations: 57
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0.000837	0.005169	-0.161974	0.8720
X2	0.001785	0.008351	0.213706	0.8316
X3	0.002466	0.011591	0.212765	0.8324
X4	-3.98E-05	0.002385	-0.016675	0.9868
X5	-0.000493	0.002327	-0.212010	0.8330
RESID(-1)	0.375541	0.142296	2.639144	0.0111
RESID(-2)	-0.046616	0.144509	-0.322584	0.7484

R-squared	0.123835	Mean dependent var	0.004433
Adjusted R-squared	0.018695	S.D. dependent var	0.064175
S.E. of regression	0.063572	Akaike info criterion	-2.558687
Sum squared resid	0.202073	Schwarz criterion	-2.307786
Log likelihood	79.92257	Hannan-Quinn criter.	-2.461178
Durbin-Watson stat	1.988608		

MOTTO

Hari ini lebih baik dari hari kemarin dan

Hari esok lebih baik dari hari ini

“ Anglaras ilining banyu, angeli ananging ora keli”

(Sengaja mengikuti arus tapi jangan terbawa arus).

(Sunan kalijaga)

"Ingatlah, sesungguhnya wali-wali (kekasih-kekasih) Allah itu tidak ada kekhawatiran pada mereka dan mereka juga tidak sedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertaqwa" (Qs. Yunus: 62-63)

VISI

Menjadi Manusia Unggul, Kuat Akal, Financial dan Spiritual

Yang berguna bagi Alam semesta

PEDOMAN TRANSLETERASI

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Kosongan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakditambahkan	Tidakdilambangkan
ب	bā’	b	be
ت	tā’	t	te
ث	‘sā	ṡ	es (dengantitik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā’	ḥ	ha (dengantitik di bawah)
خ	khā’	kh	kadan ha
د	dāl	d	de
ذ	ẑāl	ẑ	zet (dengantitik di atas)
ر	rā’	r	er
ز	zāi	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	esdan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengantitik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengantitik di bawah)
ط			te (dengantitik di bawah)

ظ	ṭā’	ṭ	zet (dengantitikdibawah)
ع	ẓā’	ẓ	komaterbalik di atas
غ	‘ain	‘	ge
ف	gain	g	ef
ق	fā	f	qi
ك	qāf	q	ka
ل	kāf	k	el
م	lām	l	em
ن	mīm	m	en
و	nūn	n	w
هـ	wāwu	w	ha
ء	hā’	h	apostrof
ي	hamzah	‘	ye
	yā	Y	

B. KonsonanRangkapkarena*Syaddah*DitulisRangkap

متعدّدة	ditulis	*Muta’addidah*
عدّة	ditulis	*‘iddah*

C. *Tā' marbūṭah*

Semua*Tā' marbuṭāh*ditulisdengan h, baikberadapadaakhir kata tunggalataupunberada di tengahpenggabungan kata (kata yang diikutioleh kata sandang "al").Ketentuaninitidakdiperlukanbagi kata-kata Arab yang sudahterserapdalambahasa Indonesia, sepertishalat, zakat, dansebagainyakecualidikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	*Hikmah*
علّة	ditulis	*'illah*
كر امة الأو ليا ء	ditulis	*Karamah al-auliya'*

D. VokalPendekdanPenerapannya

----َ---	Fatḥah	ditulis	*a*
----ِ---	Kasrah	ditulis	*i*
----ُ---	Ḍammah	ditulis	*u*

فعَل	Fatḥah	ditulis	*fa'ala*
ذُ كر	Kasrah	ditulis	*żukira*
يَذ هب	Ḍammah	ditulis	*yaẑhabu*

E. VokalPanjang

1. fatḥah + alif	Ditulis	*Ā*
جا هليّة	Ditulis	*jāhiliyyah*

2. fatḥah + ȳa’mati	Ditulis	*ā*
تَنسى	Ditulis	*tansā*
3. kasrah + ȳa’ mati	Ditulis	*ī*
كر يم	Ditulis	*karim*
4. Ḍ{amah + wawumati}	Ditulis	*ū*
فروض	Ditulis	*furūḍ*

F. VokalRangkap

1. fatḥah + ȳa’ mati	Ditulis	*Ai*
بينكم	Ditulis	*bainakum*
2. fatḥah + wāwumati	Ditulis	*au*
قول	Ditulis	*qaul*

G. VokalPendek yang BerurutandalamSatu Kata DipisahkandenganApostrof

أأ نتم	Ditulis	*a’antum*
أ عدّت	Ditulis	*u’iddat*
لئن شكر تم	Ditulis	*la’insyakartum*

H. Kata SandangAlif + Lam

1. Biladiikutihuruf*Qamarriyah*makaditulisdenganmenggunakanhurufawal “al”

القرر أن	Ditulis	*al-Qur’ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

2. BiladiikutihurufSyamsiyyahditulissesuaidenganhurufpertamaSyamsiyyahtersebut

السّما ء	Ditulis	*as-Samā’*
الشّمس	Ditulis	*asy-Syams*

I. Penulisan Kata-Kata dalamRangkaianKalimat

Ditulismenurutpenulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	*ẑawi al-furūḍ*
أهل السّنّة	Ditulis	*ahl as-sunnah*

‘

J. Pengecualian

Sistemtransliterasiinitidakberlakupada:

1. Kosa kata Arab yang lazimdalamBahasa Indonesia danterdapatdalamKamusUmumBahasa Indonesia, misalnya: al-Qur‟an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

2. Judulbuku yang menggunakan kata Arab, namunsudahdilatinkanolehpenerbit, sepertijudulbuku al-Hijab.

3. Namapengarang yang menggunakannama Arab, tetapiberasaldarinegara yang menggunakanhuruflatin, misalnyaQuraishShihab, Ahmad SyukriSoleh.

4. Namapenerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnyaTokoHidayah, Mizan.

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : B-1191/UN.02/DEB/PP.05.3/09/2016

Skripsi/Tugas akhir dengan judul:

Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di JII pada Tahun 2013-2015

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Yunas Dewanta Mutik
NIM : 11390048
Telah dimunaqasyahkan pada : 30 Agustus 2016
Nilai Munaqosyah : B+
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Keuangan Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah:
Ketua Sidang,

Drs. A. Yusuf Khoirudin, M.Si.
NIP. 19661119 199203 1 002

Penguji I

Muh. Ghafur Wibowo, SE, M.Sc
NIP. 19800314 200312 1 003

Penguji II

Dr. Abdul Haris, M.Ag.
NIP. 19710423 199903 1 001

Yogyakarta, 7 September 2016
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dekan,

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kelapangan, kesabaran, dan kelancaran untukku dalam mengerjakan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

Kedua orangtuaku tercinta Ayahanda Sigit Parwanto dan Ibunda Dede Rohimah, yang tak pernah lelah memberikan dukungan, semangat, dan do'a yang tiada hentinya untukku. Tiada kata yang cukup untuk menggambarkan semua cinta kalian yang begitu luar biasa.

Sahabat-sahabat terbaik seperjuangan yang selalu menemaniku selama ini

Semua teman-teman KUI B 2011 yang telah menjalin kebersamaan dan persaudaraan dari awal kuliah.

Keluarga Besar Jurusan Keuangan Islam Angkatan 2011.

Semoga Allah Menyayangi dan Meridhoi kita semua serta menyatukan kita sampai di surga-Nya. Amin.

Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Yunas Dewanta Mutik
NIM	: 1139048
Jurusan/Prodi	: Keuangan Syari'ah / Ekonomi Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM *JAKARTA ISLAMIC INDEX* "**.adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *bodynote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi, dan dipergunakan sebagaimana perlunya

Wassalamu'alaikum Wr. Wb..

Yogyakarta, 2 Agustus 2016

Penyusun

Yunas Dewanta Mutik

NIM. 11390048

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Yunas Dewanta Mutik

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yunas Dewanta Mutik
NIM : 11390048
Judul Skripsi : **"Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Perusahaan Yang Terdaftar Dalam *Jakarta Islamic Index*"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Keuangan Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Syawwal 1437 H
21 Juli 2016 M

Pembimbing I

Drs. Akh. Yusuf Khoiruddin, M.Si
NIP. 19661119 199203 1 002